



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Dan
BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
17. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
19. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 22. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 23. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
 25. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 26. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Banggai Kepulauan atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Banggai Kepulauan atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 29. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 30. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
 31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

32. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak daerah dan retribusi daerah.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
42. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau

- kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 46. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.
 47. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat terhadap bangunan Gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan.
 48. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 49. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 50. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
 51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
55. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
56. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
57. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan jaminan Kesehatan untuk masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia nantinya secara bertahap.
58. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
59. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
60. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
61. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
62. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
63. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.

64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara Negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen) dan maksimal 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian.
 - b. bentuk pemanfaatan Obyek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk NJOP Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) atau lebih.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen) untuk NJOP di bawah Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).

- (4) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) untuk NJOP Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) atau lebih.

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 9

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;

5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha;
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; dan
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga Negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutanganya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan :
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. restoran yang minimal menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; dan
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

- e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik;

- d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
- e. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agro wisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkir kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan

perhitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 8% (delapan persen).
- (2) Khusus tarif PBJT untuk diskotik sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi tenaga listrik untuk pelanggan umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 2% (dua persen); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Jasa Makanan dan Minuman untuk :
 - a. tarif restoran sebesar 7% (tujuh persen); dan
 - b. tarif jasa boga sebesar 9% (sembilan persen).
- (5) Khusus tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebesar 9% (sembilan persen).
- (6) Khusus tarif PBJT atas Jasa Parkir sebesar 8% (delapan persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanandan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklameme lekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor :
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 36

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;

- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 45

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batutulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomite;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullersearch*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;

- ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindah tangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku diwilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 66

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 67

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 72

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 73

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 74

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a yang dipungut Retribusi meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;

- c. pelayanan parkir ditepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a yang tidak dipungut Retribusi meliputi Retribusi pengendalian lalu lintas.
 - (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Detail rincian objek yang diatur didalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 79

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.
- (4) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/Kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (3) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar

tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 85

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b yang dipungut Retribusi meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan asset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang tidak dipungut adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek yang diatur didalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
- (4) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b yaitu penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan.
- (3) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (3) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak

termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan.
- (3) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.
- (3) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan jasa kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (3) Struktur dan besaran tarif atas penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf g adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan.

- (3) Struktur dan besaran tarif atas penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf h yaitu penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.
- (3) Struktur dan besaran tarif atas penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis asset, jenis pelayanan,

frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan asset Daerah.

- (6) Struktur dan besaran tarif atas penggunaan jasa pelayanan aset Daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha atas layanan yang disediakan/diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 97

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c adalah PBG.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak dipungut yaitu penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 99

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan pelayanan pemberian izin PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan yang terdiri atas ::
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks bangunan Gedung terbangun;
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks I prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
- (4) Struktur dan besaran tarif atas pelayanan pemberian izin PBG tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 101

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan

jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu surat pemberitahuan Pajak.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak untuk jenis jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang atau kurang dibayar atau disetor.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 103

Tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN

Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak dan Retribusi; dan
 - d. program Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam mendukung kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kondisi Objek Pajak atau Objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi :
 - a. Objek Pajak dan Retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. Objek Pajak dan Retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM
RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 105

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 106

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

- perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
 - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

- lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun atau pidana denda maksimal 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun atau pidana denda maksimal 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 111

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 110 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 113

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi :
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 115

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 116

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas ansuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas ansuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas ansuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas ansuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah ansuran Pajak dan/atau masa ansuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah ansuran Pajak dan/atau masa ansuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian ansuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran ansuran setiap masa ansuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah didatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 16);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 22);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 1);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 11);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 10);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 11);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 3);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 5);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 3);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 9);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 11);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 12);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 13);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

- dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 7);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 8);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 9);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 1);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 2);
 - ee. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 48);
 - ff. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 49);
 - gg. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 51);
 - hh. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 48); dan
 - ii. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 8);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 121

Khusus ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada awal bulan Tahun 2025.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 97,05/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan adanya 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar pengaturan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerah melalui Peraturan Daerah, sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip hukum otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai dasar normative terbentuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menjalankan Pemerintahan Daerah bewenang memberlakukan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan otonomi daerahnya.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan paradigma baru dalam arah kebijakan peraturan perundang-undangan dan pertumbuhan ekonomi Negara dan daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyusun dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan diberlakukan oleh Pemerintah harus bersumber dan berdasarkan delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki harmonisasi hirarkhis dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta sesuai dengan system hukum yang dianut.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak berperan besar dalam membiayai pembangunan Negara untuk menyejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang termuat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak memiliki fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulierend (mengatur). Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor Pajak secara optimal. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan Pajak melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sepanjang berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat beberapa kali permohonan pengujian Undang-Undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi diantaranya terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 80/PUU-XV/2017.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 yang mengatur bahwa : “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tariff Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kepastian hukum pengaturan tentang adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan dan memunggut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini masih diatur dalam berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Olehnya itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan

Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 187 huruf b diatur bahwa “Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang tersebut. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut, perlu disempurnahkan dan disatukan pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan maksud jangkauan dan arah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

1. menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan layanan fasilitas umum Daerah.
2. meningkatkan kemandirian Daerah melalui penguatan *local taxing power*.
3. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada diharapkan mampu mengakomodir dinamika perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. perlunya sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya yang mengatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
5. dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menjadi salah satu standar pengawasan dan evaluasi pertumbuhan ekonomi Daerah.
6. dengan brlakunya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu mendorong partum uhan investasi dan kemudahan berinvestasi yang menjamin adanya kepastian hukum di Daerah Kabupaten Banggai kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misalnya Kecamatan A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “jual beli” adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tukar menukar” adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “hibah wasiat” adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “warisan” adalah semua harta

benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang / uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “penggabungan usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “peleburan usaha” adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “pemekaran usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “diluar pelepasan hak” adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak milik” adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak guna usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak guna bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Agraria.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak milik atas satuan rumah susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak pengelolaan” adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain,

berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak: adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik

roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hotel" adalah sebuah bangunan, perusahaan atau usaha yang menyediakan jasa inap dan juga menyediakan makanan dan minuman bagi tamu yang datang serta mempunyai fasilitas jasa lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hotel" adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan Bersama seperti kamar mandi, ruang TV, area duduk atau kerja dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "villa" adalah sebuah bangunan, berbentuk rumah yang bisa disewa untuk tempat menginap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pondok wisata" adalah rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan untuk tamu/wisatawan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "motel" adalah semacam hotel yang dikelola untuk melayani pelanggan transit atau suatu tempat penampungan buat pendatang atau bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "losmen" adalah sejenis penginapan komersial yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada hotel.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wisma pariwisata" adalah sejenis tempat penginapan di tempat wisata yang menawarkan suasana seperti rumah sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pesanggrahan" adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rumah penginapan" adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan dimana orang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh, penyimpanan barang dan akses fungsi umum.

Yang dimaksud dengan "*questhouse*" atau rumah tamu adalah sejenis penginapan.

Yang dimaksud dengan "*resort*" adalah salah satu Kawasan yang didalamnya terdapat akomodasi dan sarana hiburan sebagai penunjang kegiatan wisata.

Yang dimaksud dengan "*cottage*" adalah rumah kecil yang juga dikenal sebagai rumah musiman yang berlokasi disekitar pantai atau danau atau dipedesaan dengan bentuk bangunan terpisah, disewakan untuk keluarga serta dilengkapi dengan fasilitas rekreasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan "glamping" adalah aktivitas berkemah dengan gaya yang lebih mewah dan nyaman daripada kegiatan berkemah di tenda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain dari voucher” antara lain berupa kupon, tiket, kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Yang dimaksud dengan “mata uang lain antara lain berupa Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reklame papan atau billboard” adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, di pasang atau di

gantungkan termasuk yang di gambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/*berm*, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.

Yang dimaksud dengan “reklame *megatron*, *videotron*, atau *megatron*” adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat di ubah-ubah, terprogram dan di fungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reklame kain” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan-bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, dan atau bahan lain yang sejenis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reklame lekat (stiker, poster)” adalah reklame yang berbentuk lembaran terlepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reklame selebaran (selebaran, brosur dan *leaflet*)” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “reklame berjalan, termasuk pada kendaraan” adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dengan maksud mempromosikan suatu barang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “reklame udara” adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “reklame apung” adalah Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air, termasuk reklame di kapal dan pelampung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “reklame film/slide” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang berada didalam ruangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “reklame peragaan” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Air Tanah" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “tempat kesehatan lainnya yang sejenis” adalah klinik bersalin, poliklinik Desa (polindes), dan pos kesehatan Desa (poskesdes).

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah” adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padatan.

Yang dimaksud dengan “pengumpulan sampah” adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke lokasi pembuangan sementara.

Yang dimaksud dengan “lokasi pembuangan sementara” adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ketempat lokasi pendauran ulang, pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir sampah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengangkutan sampah” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber sampah dan/atau dari TPS ke TPA.

Yang dimaksud dengan “pembuangan akhir sampah” adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan “parkir” adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk beberapa saat yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 83

Yang dimaksud dengan “pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lahan diarea pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidentil lainnya yang berada di area pasar.

Yang dimaksud dengan “los” adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang dibangun untuk menjajakan barang-barang dagangan.

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bagian dari bangunan yang satu dan sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.

Yang dimaksud dengan “pedagang” adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat pelelangan ikan (TPI)” adalah sebuah pasar yang biasanya terletak didalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan ditempat tersebut terjadi transaksi penjualan.

Yang dimaksud dengan “hasil bumi” seperti hasil pertanian dan hasil perkebunan termasuk hasil peternakan.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan” seperti tempat parkir, toilet, air bersih, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “parkir” adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir” adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah atau lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan.

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir diluar badan jalan” adalah tempat khusus parkir diluar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/ villa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Pada prinsipnya setiap daging yang dikonsumsi oleh masyarakat yakni daging yang berasal dari hewan yang dinyatakan sehat sesuai dengan hasil pemeriksaan hewan.

Untuk itu sebagai upaya pencegahan dan penyebaran penyakit pada hewan ternak, maka setiap hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang memiliki sertifikasi dibidang kesehatan hewan. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan terdiri dari :

- a. pemeriksaan *ante mortum*, yakni pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian sebelum ternak dipotong; dan
- b. pemeriksaan *post mortum*, yakni pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian setelah ternak dipotong.

Yang dimaksud dengan “rumah potong hewan” adalah sebuah tempat hewan ternak dipotong dan diproses menjadi daging.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekreasi” adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atas keinginannya dan mendatangkan kepuasan.

Yang dimaksud dengan “tempat rekreasi” adalah sebuah tempat yang dipergunakan atau dituju untuk menyegarkan kembali pikiran dari kepenatan berpikir dan bekerja untuk jernih kembali.

Yang dimaksud dengan “pariwisata” adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.

Yang dimaksud dengan “olahraga” adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, baik secara jasmani maupun rohani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “kendaraan di air” adalah meliputi perahu, kapal tongkang, kapal kayu, kapal besi, dan *speed boad* (kapal cepat).

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produksi usaha daerah” adalah setiap usaha atau kegiatan Pemerintah Daerah untuk menciptakan atau mempertinggi nilai guna ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah seperti produksi hasil peternakan, tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan, serta produksi perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “barang milik Daerah” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sewa” adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerjasama pemanfaatan (KSP)” adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagun guna serah (BGS)” adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Yang dimaksud dengan “bagun serah guna (BSG)” adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI)” adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAER

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DI DDAERAH

1. Tarif Konsultasi/Pemeriksaan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi / Pemeriksaan			
	- Dokter Umum	15,000	40,000	55,000
	- Dokter Gigi	15,000	40,000	55,000
	- Dokter Spesialis Dasar	15,000	70,000	85,000
	- Dokter Spesialis Penunjang	15,000	50,000	65,000
	- Gizi	15,000	20,000	35,000
	- Psikolog	15,000	20,000	35,000
2	Pemeriksaan Awal	15,000	20,000	35,000
3	Pemeriksaan Lanjutan			
	a. Psikoterapi 45 menit	15,000	25,000	40,000
	b. Konsultasi 45 menit	15,000	25,000	40,000
4	Psikotest	15,000		
	a. Pemeriksaan Sederhana	20,000	35,000	55,000
	b. Pemeriksaaan Sedang	25,000	60,000	85,000
	c. Pemeriksaan Canggih	100,000	250,000	350,000

2. Tarif Tindakan Poli Spesialis Penyakit Dalam

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Ekg	25,000	40,000	65,000
2	Rectal Touche	15,000	25,000	40,000
3	Spirometri	25,000	40,000	65,000
4	Pulse Oxymetri	15,000	25,000	40,000

3. Tarif Pelayanan Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Ganti Verban	15,000	15,000	30,000
2	Pemeriksaan Luas	15,000	15,000	30,000
3	Pemeriksaaan Khusus (Vaginal Touchez)	20,000	50,000	70,000
4	Aff Hecting	15,000	25,000	40,000
5	Pap Smear	40,000	80,000	120,000
6	Imunisasi Bayi	20,000	35,000	55,000
7	Pemeriksaan USG	35,000	85,000	120,000
8	Pasang IUD	60,000	200,000	260,000
9	Aff IUD	30,000	180,000	210,000
10	Aff IUD dengan Penyulit	60,000	200,000	260,000
11	Pasang Implant	60,000	180,000	240,000
12	Aff Implant	60,000	180,000	240,000
13	Kontrol IUD	20,000	30,000	50,000
14	Pelayanan Suntik	15,000	30,000	45,000
15	Pelayanan KB (Pil + Kondom)	12,000	12,000	24,000
16	Imunisasi Ibu Hamil	18,000	24,000	42,000
17	Pemeriksaan Asam Cuka (IVA = Inpeksi Visual Asetat)	50,000	130,000	180,000
18	Vagina Toilet	60,000	84,000	144,000
19	Inspekulo	60,000	60,000	120,000

20	Biopsi	120,000	240,000	360,000
21	Debrideman	60,000	180,000	240,000
22	Pasang pesarium	60,000	120,000	180,000
22	Pasang Laminaria	120,000	240,000	360,000
23	Kateter penyulit	25,000	120,000	145,000
24	Pemeriksaan KIA	15,000	25,000	40,000
25	Tindik Telinga	15,000	20,000	35,000

4. Tindakan Poli Spesialis Bedah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Catheterisasi	20,000	120,000	140,000
2	Ganti Verban	20,000	30,000	50,000
3	Nectrotomi	20,000	40,000	60,000
4	Incisi	20,000	60,000	80,000
5	Hecting	25,000	35,000	60,000
6	Aff Double Lumen Kateter	25,000	60,000	85,000
7	Aff Drain	20,000	30,000	50,000
8	Aff Hecting > 5cm	20,000	30,000	50,000
9	Aff Hecting 1-3 Cm	20,000	20,000	40,000
10	Aff Hecting 3-5 Cm	20,000	25,000	45,000
11	Aff Kateter	20,000	40,000	60,000
12	Aff Kateter Dengan Penyulit	25,000	60,000	85,000
13	Aff Tampon	20,000	80,000	100,000
14	Aff Wire (Bedah Mulut)	90,000	150,000	240,000
15	Aff Wire (Orthopedic)	60,000	90,000	150,000
16	Dilatasi Phinosis	25,000	35,000	60,000
17	Dilatasi Anus	20,000	35,000	55,000
18	Ekstraksi Corpus Alineum	30,000	90,000	120,000
19	Ekstraksi Kuku	20,000	55,000	75,000
20	Lavament	20,000	25,000	45,000
21	Pasang Gips	45,000	65,000	110,000
22	Buka Gips	25,000	25,000	50,000
23	Pasang Spalk	20,000	20,000	40,000
24	Puncti Vesika Urinaria	25,000	60,000	85,000
25	Reposisi/Fixasi Verban	20,000	45,000	65,000
26	Vena Secti	75,000	120,000	195,000
27	Cros Insisi	25,000	60,000	85,000
28	Aff Cateter	15,000	20,000	35,000
29	Circumsisi	60,000	300,000	360,000
30	Ekstirpasi Tumor 5 cm	30,000	150,000	180,000
31	Injeksi Scleroting	25,000	35,000	60,000

5. Tarif Tindakan Poli Spesialis Kulit Kelamin

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Injeksi Intralesi	15,000	40,000	55,000
2	Biopsi Ringan	60,000	120,000	180,000
3	Eksisi Ringan	90,000	120,000	210,000
4	Kuaterisasi	180,000	300,000	480,000
5	Kerokan Jamur	15,000	45,000	60,000
6	Debridemen Luka Ringan	15,000	30,000	45,000
7	Preck Test	60,000	180,000	240,000

6. Tarif Poli Spesialis Mata

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Tonometri	15,000	30,000	45,000
2	Funduscopy	20,000	30,000	50,000
3	Genioscopy	20,000	30,000	50,000

4	Epilasi	15,000	30,000	45,000
5	Anel/Sondage	35,000	60,000	95,000
6	Irigasi/Spooling	35,000	60,000	95,000
7	Excici	60,000	120,000	180,000
8	Incici	60,000	75,000	135,000
9	Kampimetri	60,000	85,000	145,000
10	Auto Refraksi	25,000	35,000	60,000
11	Retinometri	25,000	35,000	60,000
12	Slit Lamp Examination	25,000	35,000	60,000
13	Keratometri	60,000	85,000	145,000
14	Schimer Test	20,000	40,000	60,000
15	Refraksi	15,000	15,000	30,000
16	Ganti Verban	20,000	15,000	35,000
17	Absisi Corpus Alineum	50,000	75,000	125,000

7. Tarif Tindakan Poli Spesialis Anak

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Inhalasi/Nebulizer	25,000	50,000	75,000
2	Imunisasi	20,000	25,000	45,000
3	Imunisasi Hepatitis	20,000	25,000	45,000

8. Tarif Tindakan Poli Spesialis THT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Telinga			
	- Ekstraksi Cerumen	25,000	35,000	60,000
	- Ekstraksi Corpus Alineum Telinga/ Ekstraksi polip	30,000	35,000	65,000
	- Tampon Telinga	15,000	15,000	30,000
	- Audiometri	25,000	35,000	60,000
	- Parasentese	35,000	85,000	120,000
	- Spooling Telinga/Ekstraksi Curemen	20,000	30,000	50,000
	- Toilet Tampon Burowi	20,000	25,000	45,000
2	Hidung			
	- Nasal Toilet	20,000	30,000	50,000
	- Belog Tampon	20,000	30,000	50,000
	- Kaustik Konka	25,000	35,000	60,000
	- Ekstraksi Corpus Alineum Konka	25,000	35,000	60,000
	- Lidokain/Ephedrin Nasal Spray	20,000	30,000	50,000
	- Kaustik + Tampon Boor Zalf	30,000	45,000	75,000
3	Tenggorokan			
	- Corpus Alineum Faring	20,000	30,000	50,000
	- Kaustik Faring	20,000	30,000	50,000
	- Audiometri	60,000	60,000	120,000
	- Laringoscopy Indirec	20,000	30,000	50,000
	- Laringoscopy	20,000	30,000	50,000
	- Parasentase	60,000	60,000	120,000
4	Tes Alergi			
	- Tes Tempel	15,000	25,000	40,000
	- Ekstrak Makanan	20,000	30,000	50,000

9. Tarif Tindakan Poli Spesialis Saraf

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Tes Keseimbangan/Pendengaran	20,000	30,000	50,000
2	Funduscopy	20,000	30,000	50,000
3	Injeksi Lokal P/C	20,000	30,000	50,000
4	Injeksi Lokal K/P	25,000	35,000	60,000
5	Lumbal Punksi	35,000	85,000	120,000

6	EEG/Brain Mapping	200,000	120,000	320,000
7	Perspirasi Test	60,000	60,000	120,000

10. Tarif Tindakan Poli Gigi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Tambal Sementara	30,000	50,000	80,000
2	Open Bur, Roaming, Filling	24,000	48,000	72,000
3	Pengisian Saluran Akar	48,000	72,000	120,000
4	Dental Photo 1 Regio	20,000	30,000	50,000
5	Tambah Permanen			
	Tambal Amalgam	48,000	72,000	120,000
	Composite Tanpa Sinar	60,000	120,000	180,000
	Composite Dengan Sinar	60,000	180,000	240,000
6	Toilet (Pyralvex, Albotyl, Pulperil, dll)	24,000	36,000	60,000
7	Spooling/Irigasi	24,000	36,000	60,000
8	Bongkar Tambalan			
	Bongkar Tambalan Silikat/Amalgam	24,000	36,000	60,000
	Bongkar Gigi Palsu	36,000	84,000	120,000
	Bongkar Crown	24,000	36,000	60,000
9	Ekstraksi (Cabut Gigi)			
	Gigi Susu Non Injeksi	20,000	50,000	70,000
	Gigi Susu Dengan Injeksi	20,000	80,000	100,000
	Gigi Tetap Anterior	36,000	84,000	120,000
	Gigi Tetap	60,000	120,000	180,000
	Komplikasi	60,000	180,000	240,000
10	Incisi			
	Ekstra Oral	60,000	180,000	240,000
11	Curetage	60,000	180,000	240,000
12	Scaling/Rahang	60,000	120,000	180,000
13	Uperculectomi	60,000	300,000	360,000
14	Alveolectomi/2 Gigi	60,000	120,000	180,000
15	Extirpasi Mucocele			
	Kecil	60,000	180,000	240,000
	Besar	60,000	300,000	360,000
16	Extirpasi Epulis			
	Kecil	60,000	180,000	240,000
	Besar	60,000	300,000	360,000
17	Ginggivectomy/Kuadran	60,000	300,000	360,000
18	Odontectomy			
	Ringan	66,000	300,000	366,000
	Sedang	102,000	420,000	522,000
	Berat	360,000	540,000	900,000
19	Fistulectomy	24,000	72,000	96,000
20	Inter Dental Wiring	120,000	360,000	480,000
21	ARCH (APEX)	120,000	420,000	540,000
22	Extirpasi			
	Ringan	24,000	120,000	144,000
	Sedang	72,000	360,000	432,000
	Berat	72,000	384,000	456,000
23	Inter Mixililari Wring	120,000	360,000	480,000
24	Frenectomy	60,000	300,000	360,000
25	Kontrol Wring	24,000	36,000	60,000
26	Dry Soket	24,000	36,000	60,000
27	Hecting Mukosa Mulut/Jahitan	18,000	12,000	30,000
28	Buka Hecting/Jahitan	12,000	12,000	24,000
29	Gigi Palsu			
	-Akrilik Lepasan Pertama	60,000	120,000	180,000
	-Gigi Akrilik Selanjutnya	60,000	66,000	126,000
	-Full RA/ RB	600,000	1,800,000	2,400,000
	-Crouwn / Bridge Porcelin	360,000	600,000	960,000

	-Crouwn / Bridge Acrilik / Gigi	180,000	420,000	600,000
	-Metal Frame / Rahang	360,000	240,000	600,000
	-Bridge Fiber Acrilik / Composite / Gigi	360,000	600,000	960,000
	-Crouwn Sementara / Gigi	60,000	60,000	120,000
30	Pin Retensi Unit	48,000	72,000	120,000
31	Cetak Algniate / Rahang	24,000	36,000	60,000

11. Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	Hematologi			
1	Hemoglobin	10,800	4,800	15,600
2	Leukosit	10,800	4,800	15,600
3	Trombosit	10,800	4,800	15,600
4	Differensial Count	10,800	4,800	15,600
5	Eritrosit	10,800	4,800	15,600
6	Hematokrit	10,800	4,800	15,600
7	LED	25,200	10,800	36,000
8	Darah Rutin	60,000	24,000	84,000
9	Darah Lengkap (Darah Rutin+LED)	65,000	35,000	100,000
10	Waktu Perdarahan	24,000	18,000	42,000
11	Waktu Pembekuan	24,000	18,000	42,000
12	Darah Tepi	138,000	60,000	198,000
13	Retikulosit	36,000	24,000	60,000
14	Waktu Protrombine (PT)	168,000	72,000	240,000
15	Waktu Protrombine Teraktivasi (APTT)	168,000	72,000	240,000
	Urinalisa			
1	Protein Urine	6,000	3,600	9,600
2	Reduksi Urine	6,000	3,600	9,600
3	Urobilin Urine	6,000	3,600	9,600
4	Bilirubin Urine	6,000	3,600	9,600
5	Aseton Urine	6,000	3,600	9,600
6	Urine Rutin	42,000	18,000	60,000
7	Sedimen Urine	18,000	18,000	36,000
8	Plano Test	12,000	18,000	30,000
9	Narkoba	168,000	72,000	240,000
	Kimia Darah :			
1	Glukosa Puasa	24,000	12,000	36,000
2	Glukosa Sewaktu	24,000	12,000	36,000
3	Glukosa 2 Jam PP	24,000	12,000	36,000
4	Cholesterol Total	32,400	15,600	48,000
5	Cholesterol HDL	50,400	21,600	72,000
6	Cholesterol LDL	50,400	21,600	72,000
7	Trigliserida	32,400	15,600	48,000
8	SGPT	30,000	14,400	44,400
9	SGOT	30,000	14,400	44,400
10	Billirubin Total	31,200	13,200	44,400
11	Billirubin Direk	31,200	13,200	44,400
12	Billirubin Indirek	31,200	13,200	44,400
13	Protein Total	33,600	14,400	48,000
14	Albumin	33,600	14,400	48,000
15	Ureum	30,000	14,400	44,400
16	Kreatinin	30,000	14,400	44,400
17	Asam Urat	25,200	20,400	45,600
18	Fe Serum	108,000	48,000	156,000
19	TIBC	108,000	42,000	150,000
20	CK	102,000	42,000	144,000
21	CK MB	243,600	104,400	348,000
22	Tropinin	324,000	132,000	456,000

23	Alkali Fosfatase	33,600	14,400	48,000
24	Gamma GT	48,000	24,000	72,000
25	HbA1C	120,000	80,000	200,000
26	Elektrolit	168,000	72,000	240,000
	Imunologi			
1	Widal	60,000	60,000	120,000
2	IgM Anti Salmonella	180,000	78,000	258,000
3	HBs Ag	108,000	48,000	156,000
4	Anti HBS	102,000	42,000	144,000
5	Anti HCV	294,000	126,000	420,000
6	HIV	108,000	72,000	180,000
7	Golongan Darah	26,000	12,000	38,000
8	IgG IgM Anti Dengue	120,000	60,000	180,000
9	COOMB's Test	24,000	12,000	36,000
10	FT4	210,000	90,000	300,000
11	TSHS	216,000	96,000	312,000
12	Sel LE	60,000	36,000	96,000
13	ASTO	63,000	27,000	90,000
14	RF	63,000	27,000	90,000
15	CRP	84,000	36,000	120,000
16	TUBEX	180,000	120,000	300,000
17	Swab Anti Gen Covid	150,000	125,000	275,000
18	TCM Covid	500,000	400,000	900,000
	Feses			
1	Faeses Rutin	24,000	36,000	60,000
2	Darah samar	20,000	18,000	38,000
	Mikrobiologi			
1	DDR	24,000	36,000	60,000
2	BTA 3x	90,000	48,000	138,000
3	Pewarnaan GRAM	25,000	12,000	37,000
4	Jamur	25,000	24,000	49,000
	Analisa Gas Darah	228,000	96,000	324,000
	Analisa Sperma	120,000	360,000	480,000

12. Tarif Pelayanan Gawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Rekam Medik	20,000	10,000	30,000
2	Periksa Dokter Jaga	20,000	50,000	70,000
3	Konsultasi Dokter Ahli	20,000	60,000	80,000
4	Pemeriksaan Awal	10,000	20,000	30,000
5	Tindakan			
	a. Suntikan IM/Kali	15,000	5,000	20,000
	b. Suntikan IV/Kali	15,000	5,000	20,000
	c. Nebulizer	30,000	40,000	70,000
	d. Tampon Telinga	15,000	10,000	25,000
	e. Tampon Hidung	15,000	10,000	25,000
	f. Pemasangan Collar Neck	15,000	15,000	30,000
	g. Pengeluaran Benda Asing di Hidung	15,000	35,000	50,000
	h. Irigasi mata	15,000	25,000	40,000
	i. Rumpfeed Test	10,000	10,000	20,000
	j. Pulse Oxymetri	10,000	10,000	20,000
	k. Insisi Abses			
	- Kecil	15,000	20,000	35,000
	- Sedang	20,000	25,000	45,000
	- Besar	25,000	30,000	55,000
	- Perawatan Luka			
	- Ringan	15,000	20,000	35,000

	- Sedang	20,000	25,000	45,000
	- Berat	25,000	30,000	55,000
I.	Perawatan Luka Bakar			
	- Ringan	15,000	20,000	35,000
	- Sedang	20,000	35,000	55,000
	- Berat	25,000	40,000	65,000
m.	Pemasangan ETT	36,000	84,000	120,000
n.	Pemasangan Oropharingeal Airway	20,000	20,000	40,000
o.	Pemasangan Transfusi darah	15,000	45,000	60,000
p.	Pemasangan Traksi	15,000	45,000	60,000
q.	Pemasangan Gips	24,000	36,000	60,000
r.	Perawatan Infus	15,000	10,000	25,000
s.	Pemasangan OGT	15,000	35,000	50,000
t.	Pemasangan Cerobong Angin	15,000	15,000	30,000
u.	Pemasangan ventilator	60,000	120,000	180,000
v.	Lumbal pungsi	25,000	60,000	85,000
w.	Pemasangan obat supositoria	15,000	10,000	25,000
x.	Resusitasi cairan	15,000	20,000	35,000
y.	Pemeriksaan Dalam	15,000	20,000	35,000
z.	Pemasangan syringe pump	15,000	35,000	50,000
aa.	Pemasangan infus pump	20,000	30,000	50,000
bb.	Ganti Cairan	5,000	5,000	10,000
cc.	Aff infus	15,000	10,000	25,000
dd.	Asuhan Keperawatan	10,000	12,000	22,000
ee.	Pasang Infus Pertama	15,000	24,000	39,000
ff.	Pasang Infus Ulangan	15,000	18,000	33,000
gg.	Pasang Infus Anak	15,000	30,000	45,000
hh.	Skin Test	15,000	15,000	30,000
ii.	Vena Sectie	48,000	144,000	192,000
jj.	Spooling Lambung	25,000	70,000	95,000
kk.	Resusitasi	36,000	84,000	120,000
ll.	Suction/Kali	5,000	10,000	15,000
mm.	Reposisi Tendon	48,000	120,000	168,000
nn.	Reposisi Fiksasi	60,000	180,000	240,000
oo.	Punctive Vesica Urinaria	25,000	60,000	85,000
pp.	Perawatan Gangren/kali kecil	15,000	25,000	40,000
qq.	Perawatan Hameroid/kali	15,000	30,000	45,000
rr.	Pemasangan Spalk untuk Bayi/Anak	15,000	25,000	40,000
ss.	Pemasangan Spalk untuk Dewasa	24,000	36,000	60,000
tt.	Pasang NGT	20,000	42,000	62,000
uu.	Pasang Kateter	15,000	30,000	45,000
vv.	Spooling Kateter	15,000	30,000	45,000
ww.	Pasang Gips diluar bahan	25,000	60,000	85,000
xx.	Observasi	25,000	35,000	60,000
yy.	Lavament (Klisma)	25,000	35,000	60,000
zz.	Jahitan Luka (Per Hecting)	6,000	6,000	12,000
aaa.	Insisi	25,000	35,000	60,000
bbb.	Ganti Verban/DM	15,000	25,000	40,000
ccc.	Ekstraksi Kuku	35,000	60,000	95,000
ddd.	Dilatasi Vimosi/Anus	25,000	40,000	65,000
eee.	Debridement Patah Tulang Terbuka	60,000	120,000	180,000
fff.	Debridement Luka Sedang	20,000	40,000	60,000
ggg.	Debridement Luka Ringan	15,000	25,000	40,000
hhh.	Cross Insisi	25,000	60,000	85,000
iii.	Circumsisi	60,000	180,000	240,000
jjj.	AFF Kateter	15,000	20,000	35,000
kkk.	Eksisi Hecting	15,000	25,000	40,000
lll.	Pemakaian Oksigen/Jam	24,000	6,000	30,000
mmm.	Evakuasi Pasien ke Ruangan	15,000	15,000	30,000
nnn.	Evakuasi dan perawatan Oksigen ke Ruangan	10,000	5,000	15,000
ooo.	Aff NGT	10,000	15,000	25,000

6	Pemakaian Alat			
	- Monitor EKG	60,000	50,000	110,000
	- Ventilator/Jam	30,000	45,000	75,000
	- DC Shock/Kardioversi	60,000	60,000	120,000
	- Syringe Pimp/Jam/Infus Pump	30,000	30,000	60,000
7	Rawat Sehari (One Day Care)	50,000	25,000	75,000
8	Subcuticuler Hekting	15,000	10,000	25,000
9	Debridement Luka Tetanus/Gigitan Hewan	20,000	45,000	65,000
10	Spuling Telinga	15,000	35,000	50,000

13. Tarif Layanan Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Kelas II	50,000		50,000
	Visite Dokter Umum		50,000	50,000
	Visite Dokter Spesialis		60,000	60,000
	Visite Keperawatan		30,000	30,000
	Non Medik		15,000	15,000
3	Kelas I	150,000		150,000
	Visite Dokter Umum		50,000	50,000
	Visite Dokter Spesialis		60,000	60,000
	Visite Keperawatan		30,000	30,000
	Non Medik		20,000	20,000
4	Kelas Utama/VIP	300,000		300,000
	Visite Dokter Umum		50,000	50,000
	Visite Dokter Spesialis		60,000	60,000
	Visite Keperawatan		30,000	30,000
	Non Medik		25,000	25,000
5	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	300,000		300,000
	Visite Dokter Umum		50,000	50,000
	Visite Dokter Spesialis		60,000	60,000
	Visite Keperawatan		30,000	30,000
6	Konsul Dokter Spesialis		50,000	50,000
7	Konsul Dokter Umum/Gigi		40,000	40,000
8	Perawatan Pemulihan/RR	60,000	60,000	120,000
9	Pemakaian Kamar Operasi	200,000		200,000
10	Isolasi/Perawatan Infeksi	100,000		100,000
	Visite Dokter Umum		60,000	60,000
	Visite Dokter Spesialis		85,000	85,000
	Visite Keperawatan		35,000	35,000
11	Pemakaian Kamar Bersalin	70,000		70,000

14. Tarif Tindakan Medik Di Ruang Perawatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemasangan Infus			
	Kelas II	15,000	25,000	40,000
	Kelas I	20,000	30,000	50,000
	VIP	20,000	35,000	55,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20,000	30,000	50,000
2	Pemasangan Infus Ulang			
	Kelas II	15,000	25,000	40,000
	Kelas I	15,000	30,000	45,000
	VIP	15,000	35,000	50,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15,000	30,000	45,000
3	Tindakan Suction			
	Kelas II	15,000	5,000	20,000
	Kelas I	15,000	5,000	20,000
	VIP	15,000	5,000	20,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15,000	5,000	20,000

4	Tindakan Vulve Hygiene, Penis Hygiene			
	Kelas II	15,000	20,000	35,000
	Kelas I	15,000	25,000	40,000
	VIP	20,000	30,000	50,000
	HCU/ICU/ICCU	20,000	25,000	45,000
5	Incisi Abses Kecil < 5 cm			
	Kelas II	15,000	20,000	35,000
	Kelas I	15,000	25,000	40,000
	VIP	20,000	30,000	50,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20,000	30,000	50,000
6	Incisi Abses Sedang 5 - 10 cm			
	Kelas II	15,000	48,000	63,000
	Kelas I	20,000	60,000	68,000
	VIP	25,000	90,000	85,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20,000	72,000	110,000
7	Incisi Abses Besar >10 cm			
	Kelas II	20,000	70,000	90,000
	Kelas I	25,000	90,000	115,000
	VIP	30,000	120,000	150,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	25,000	120,000	145,000
8	Perawatan Luka Bakar < 10 %			
	Kelas II	20,000	35,000	55,000
	Kelas I	25,000	40,000	65,000
	VIP	30,000	55,000	85,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	25,000	40,000	65,000
9	Perawatan Luka Bakar 10-40 %			
	Kelas II	20,000	40,000	60,000
	Kelas I	25,000	50,000	75,000
	VIP	35,000	70,000	105,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	45,000	75,000
10	Perawatan Luka Bakar > 40 %			
	Kelas II	25,000	55,000	80,000
	Kelas I	30,000	75,000	105,000
	VIP	35,000	95,000	130,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	35,000	85,000	120,000
11	Perawatan Luka Kecil			
	Kelas II	15,000	20,000	35,000
	Kelas I	15,000	25,000	40,000
	VIP	20,000	35,000	55,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15,000	30,000	45,000
12	Perawatan Luka Sedang			
	Kelas II	20,000	25,000	45,000
	Kelas I	25,000	30,000	55,000
	VIP	35,000	40,000	75,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	35,000	65,000
13	Perawatan Luka Besar			
	Kelas II	20,000	30,000	50,000
	Kelas I	25,000	35,000	60,000
	VIP	35,000	45,000	80,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	40,000	70,000
14	Buka Jahitan < 10%			
	Kelas II	15,000	20,000	35,000
	Kelas I	20,000	30,000	50,000
	VIP	25,000	35,000	60,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20,000	30,000	50,000

15	Buka Jahitan > 10 %			
	Kelas II	15,000	30,000	45,000
	Kelas I	20,000	35,000	55,000
	VIP	25,000	45,000	70,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20,000	40,000	60,000
16	Punksi Buli-Buli, Punksi Cairan Ascites			
	Kelas II	30,000	145,000	175,000
	Kelas I	35,000	180,000	215,000
	VIP	50,000	240,000	290,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	35,000	240,000	275,000
17	Punksi Pleuria (Termasuk Tindakan Madik Operatif)			
	Kelas II	60,000	240,000	300,000
	Kelas I	75,000	300,000	375,000
	VIP	120,000	420,000	540,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	85,000	420,000	505,000
18	Ganti Verban / Hari < 5 cm			
	Kelas II	15,000	20,000	35,000
	Kelas I	15,000	25,000	40,000
	VIP	15,000	35,000	50,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15,000	30,000	45,000
19	Ganti Verban / Hari 5 - 10 cm			
	Kelas I	15,000	30,000	45,000
	VIP	15,000	35,000	50,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15,000	30,000	45,000
20	Ganti Verban / Hari > 10 cm			
	Kelas II	20,000	30,000	50,000
	Kelas I	25,000	35,000	60,000
	VIP	30,000	45,000	75,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	40,000	70,000
21	Lumbal Punksi			
	Kelas II	45,000	180,000	225,000
	Kelas I	50,000	240,000	290,000
	VIP	60,000	360,000	420,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	55,000	300,000	355,000
22	Bone Marrow Punksi			
	Kelas II	25,000	180,000	205,000
	Kelas I	35,000	240,000	275,000
	VIP	85,000	360,000	445,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	60,000	300,000	360,000
23	Vena Seksi			
	Kelas II	30,000	180,000	210,000
	Kelas I	35,000	240,000	275,000
	VIP	60,000	360,000	420,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	45,000	300,000	345,000
24	DC Shock			
	Kelas II	60,000	180,000	240,000
	Kelas I	60,000	240,000	300,000
	VIP	85,000	360,000	445,000
	HCU/ICU/ICCU	75,000	300,000	375,000
25	Bilas Lambung			
	Kelas II	15,000	35,000	50,000
	Kelas I	15,000	40,000	55,000
	VIP	20,000	50,000	70,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20,000	45,000	65,000
26	Clysmas /Kali			
	Kelas II	15,000	30,000	45,000
	Kelas I	15,000	35,000	50,000
	VIP	20,000	40,000	60,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20,000	35,000	55,000

27	Resusitasi Jantung /Paru Tanpa ETT			
	Kelas II	60,000	70,000	130,000
	Kelas I	60,000	95,000	155,000
	VIP	70,000	120,000	190,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	70,000	120,000	190,000
28	Resusitasi Jantung /Paru Dengan ETT			
	Kelas II	60,000	85,000	145,000
	Kelas I	60,000	105,000	165,000
	VIP	70,000	130,000	200,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	70,000	130,000	200,000
29	Kateter Umbilical			
	Kelas III	25,000	35,000	60,000
	Kelas II	25,000	45,000	70,000
	Kelas I	25,000	60,000	85,000
	VIP	30,000	80,000	110,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	80,000	110,000
30	Pemasangan WSD			
	Kelas II	60,000	240,000	300,000
	Kelas I	85,000	300,000	385,000
	VIP	120,000	420,000	540,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	100,000	360,000	460,000
31	Belog Tampon			
	Kelas II	25,000	30,000	55,000
	Kelas I	30,000	35,000	65,000
	VIP	35,000	50,000	85,000
	HCU/ICU/ICCU	30,000	40,000	70,000
32	Perawatan Luka Gangren / Dekubitus			
	Sedang			
	Kelas II	15,000	30,000	45,000
	Kelas I	20,000	35,000	55,000
	VIP	25,000	45,000	70,000
	HCU/ICU/ICCU	25,000	45,000	70,000
33	Peraw			
	Kelas II	20,000	35,000	55,000
	Kelas I	20,000	45,000	65,000
	VIP	25,000	50,000	75,000
	HCU/ICU/ICCU	25,000	60,000	85,000
34	Pemasangan Gips			
	Kelas II	20,000	60,000	80,000
	Kelas I	25,000	70,000	95,000
	VIP	30,000	95,000	125,000
	HCU/ICU/ICCU	30,000	95,000	125,000
35	Pemasangan Traksi			
	Kelas II	20,000	60,000	80,000
	Kelas I	25,000	70,000	95,000
	VIP	30,000	100,000	130,000
	HCU/ICU/ICCU	30,000	100,000	130,000
36	Pemasangan Infus Anak / Bayi			
	Kelas II	20,000	30,000	50,000
	Kelas I	25,000	35,000	60,000
	VIP	30,000	40,000	70,000
	HCU/ICU/ICCU	30,000	35,000	65,000
37	Pemasangan Spalak Untuk Anak / Bayi			
	Kelas II	20,000	20,000	40,000
	Kelas I	25,000	25,000	50,000
	VIP	30,000	30,000	60,000
	HCU/ICU/ICCU	30,000	30,000	60,000
38	Pemasangan Spalak Dewasa			
	Kelas II	20,000	20,000	40,000
	Kelas I	25,000	25,000	50,000
	VIP	30,000	30,000	60,000
	HCU/ICU/ICCU	30,000	30,000	60,000

39	Tindakan IVFD Bayi Inkubator	20,000	35,000	55,000
40	Pasang Kateter Pertama			
	Kelas II	20,000	25,000	45,000
	Kelas I	25,000	30,000	55,000
	VIP	30,000	35,000	65,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	35,000	65,000
41	Pasang Kateter Ulangan			
	Kelas II	20,000	20,000	40,000
	Kelas I	25,000	25,000	50,000
	VIP	30,000	30,000	60,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	30,000	60,000
42	Pasang NGT Pertama			
	Kelas II	20,000	30,000	50,000
	Kelas I	25,000	35,000	55,000
	VIP	30,000	40,000	65,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	35,000	65,000
43	Pasang NGT Ulangan			
	Kelas II	20,000	25,000	45,000
	Kelas I	25,000	30,000	55,000
	VIP	30,000	35,000	65,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	35,000	65,000
44	Pasang Injection Pump Pertama/Hari			
	Kelas II	20,000	24,000	44,000
	Kelas I	25,000	30,000	55,000
	VIP	30,000	35,000	65,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	35,000	65,000
45	Pasang Injection Pump Ulangan			
	Kelas II	20,000	15,000	35,000
	Kelas I	25,000	20,000	45,000
	VIP	30,000	25,000	55,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	25,000	55,000
46	Pasang Infuse Pump Pertama/Hari			
	Kelas II	20,000	25,000	45,000
	Kelas I	25,000	30,000	55,000
	VIP	30,000	35,000	65,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	35,000	65,000
47	Pasang Injection Pump Ulangan			
	Kelas II	20,000	15,000	35,000
	Kelas I	25,000	20,000	45,000
	VIP	30,000	25,000	55,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30,000	25,000	55,000
48	Suntik IV/kali			
	Kelas II	15,000	10,000	25,000
	Kelas I	15,000	15,000	30,000
	VIP	15,000	10,000	25,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15,000	10,000	25,000
49	Suntik IM/kali			
	Kelas II	15,000	10,000	25,000
	Kelas I	15,000	15,000	30,000
	VIP	15,000	10,000	25,000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15,000	10,000	25,000
50	Memandikan Pasien	15,000	25,000	40,000
51	Perawatan Mulut	15,000	20,000	35,000
52	Melakukan Hukna (Klisma)	15,000	25,000	40,000
53	Perawatan Infus	15,000	5,000	20,000
54	Perawatan Kateter (Triway)	15,000	10,000	25,000
55	Perawatan NGT	15,000	10,000	25,000
56	Perawatan O2	15,000	10,000	25,000
57	Perawatan WSD	15,000	20,000	35,000
58	Penyuluhan Kesehatan	15,000	10,000	25,000
59	Cuci Rambut	15,000	15,000	30,000
60	Pasang Guidel	15,000	15,000	30,000

61	Pasang Tampon	15,000	15,000	30,000
62	Aff Tampon	15,000	15,000	30,000
63	Pemasangan ETT	35,000	85,000	120,000
64	Ambulasi / ROM	15,000	15,000	30,000
65	Pasang Monitor	40,000	60,000	100,000
66	Aff NGT	15,000	15,000	30,000
67	Takar Urin	15,000	10,000	25,000
68	Pembreian makanan Per Oral	15,000	10,000	25,000
69	Pemberian Obat Per Oral	15,000	10,000	25,000
70	Pemasangan Tryway	15,000	15,000	30,000

15. Tindakan Medik Di Ruang Bersalin dan Perinatologi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Perawatan Bayi Normal	15,000	40,000	55,000
2	Perawatan Tali Pusat	15,000	15,000	30,000
3	Memandikan Bayi	15,000	20,000	35,000
4	Imunisasi HBO	15,000	25,000	40,000
5	Injeksi Vit K	15,000	15,000	30,000
6	Perawatan Bayi Baru Lahir	15,000	25,000	40,000
7	Perawatan Ibu Nifas	15,000	25,000	40,000
8	Perawatan Payudara	15,000	25,000	40,000
9	Perawatan Luka perineum	15,000	25,000	40,000
10	Pemasangan Tampon	15,000	15,000	30,000
11	Aff Tampon	15,000	10,000	25,000
12	Kompresi Bimanual			
	- Eksterna	15,000	120,000	135,000
	- Interna	15,000	240,000	255,000
	- Aorta	15,000	180,000	195,000
13	Inspekulo	20,000	120,000	140,000
14	Kateter sementara	20,000	20,000	40,000
15	Pasang Laminaria	20,000	240,000	260,000
16	Pemasangan Obat supositoria	20,000	40,000	60,000
17	Asuhan Kebidanan	15,000	40,000	55,000
18	VT Kontrol	20,000	40,000	60,000
19	KTG	40,000	60,000	100,000
20	Monitor	40,000	60,000	100,000
21	Takar Urin	15,000	10,000	25,000
22	Resusitasi RBBL (Penyakit)	15,000	50,000	65,000
23	Resusitasi RBBL (Tanpa Penyakit)	15,000	25,000	40,000
24	Tindakan dokter spesialis Bayi SC	60,000	250,000	310,000
25	Perawatan Bayi Normal	15,000	36,000	51,000
26	Perawatan Bayi SC	25,000	60,000	85,000
27	Perawatan Bayi Dengan Incubator	50,000	35,000	85,000
28	Pasang Sonde	75,000	50,000	125,000
29	Vena Seksi	210,000	140,000	350,000
30	Perawatan Tali Pusat	20,000	15,000	35,000
31	RESUSITASI	120,000	80,000	200,000
32	Foto Terapi	30,000	15,000	45,000
33	Pemasangan Transfusi Darah	15,000	5,000	20,000
34	Pasang Kateter Tanpa Penyulit	35,000	25,000	60,000
35	Pasang Kateter Dengan Penyulit	90,000	60,000	150,000
36	Suction	15,000	10,000	25,000
37	Suction Via Alat	20,000	15,000	35,000
38	Hukna	30,000	20,000	50,000
39	Memandikan Bayi/hari	15,000	40,000	55,000
40	Perawatan Infus/hari	15,000	10,000	25,000
41	Perawatan Kateter/hari	15,000	10,000	25,000
42	Imunisasi Bayi	210,000	15,000	225,000
43	CPAP	1,000,000	500,000	1,500,000

16 Pelayanan Keperawatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Asuhan Keperawatan / Kebidanan Minimal	15,000	15,000	30,000
2	Asuhan Keperawatan / Kebidanan Intermediate	20,000	20,000	40,000
3	Asuhan Keperawatan / Kebidanan Total	25,000	25,000	50,000
Ket : Pelayanan Asuhan Keperawatan dihitung perhari				
a. <i>Asuhan Keperawatan Minimal</i>				
- Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri				
- Makan dan minum dilakukan sendiri				
- Ambulasi dengan pengawasan				
- Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap shift				
- Pengobatan minimal, status psikologis stabil				
b. <i>Asuhan Keperawatan Intermediate</i>				
- Sebagian aktivitas dibantu				
- Observasi tanda-tanda vital setiap 2-4 jam sekali				
- Terpasang volley cateter intake output dicatat				
- Terpasang Infuse				
- Pengobatan lebih dari sekali				
- Persiapan pengobatan perlu prosedur				
c. <i>Asuhan Keperawatan Total</i>				
- Segala aktivitas diberikan perawat				
- Posisi diatur, Observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam				
- Makan melalui NGT, terapi intravena				
- Penggunaan Suction				
- Gelisah / Disorientasi				

17 Pemeriksaan Radiologi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemeriksaan Sederhana			
	Thorax PA-AP	55,000	60,000	115,000
	Clavicula/Scapula PA-AP	55,000	60,000	115,000
	Sendi Bahu AP/Oblik	55,000	60,000	115,000
	Humerus AP/Lat	60,000	60,000	120,000
	Sendi Siku Elbow AP/Lat	60,000	60,000	120,000
	Antebrachhium AP/Lat	60,000	60,000	120,000
	Pergelangan Tangan AP/Lat	60,000	60,000	120,000
	Tangan (Manus) AP/Oblik	60,000	60,000	120,000
	Femus AP/Lat	55,000	60,000	115,000
	Lutut (Knee Joint) AP/Oblik	60,000	60,000	120,000
	Crusis AP/Lat	60,000	60,000	120,000
	Ankle Jiont	60,000	60,000	120,000
	Pedis	60,000	60,000	120,000
	Waters	55,000	60,000	115,000
	Kepala	50,000	100,000	150,000
	Rahang Atas-Bawah	55,000	60,000	115,000
	Tulang Leher	50,000	100,000	150,000
	Thoraco	50,000	100,000	150,000
	Lumbo Sacrall	50,000	100,000	150,000

	Abdomen Polos	55,000	60,000	115,000
	Panggul	55,000	60,000	115,000
	Gigi/Dental	55,000	60,000	115,000
2	Pemeriksaan Khusus			
	BNO IVP	240,000	360,000	600,000
	Cystografi	216,000	264,000	480,000
	Urethrografi	216,000	264,000	480,000
	HSG	240,000	360,000	600,000
	Oesophografi	180,000	240,000	420,000
	OMD	216,000	264,000	480,000
	Colon In Loop	240,000	360,000	600,000
	Barium Meal	180,000	300,000	480,000
	Fistulografi	216,000	240,000	456,000
	Appendiucogram	180,000	240,000	420,000
	Abdomen 3 Posisi	120,000	180,000	300,000
3	Pemeriksaan USG			
	Doppler	180,000	180,000	360,000
	Abdomen	60,000	120,000	180,000
	Appendix	60,000	120,000	180,000
	Ginekology	60,000	120,000	180,000
	Obstretik	60,000	120,000	180,000
	Tyroid	120,000	120,000	240,000
	Mammac	120,000	120,000	240,000
	Trans Vaginal	144,000	120,000	264,000

18 Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Fisioterapi Latihan Fisik Ringan	12,000	24,000	36,000
2	Massage Perkali	12,000	30,000	42,000
3	Traksi	14,400	21,600	36,000
4	Diatermi	14,400	21,600	36,000
5	Hidroterapi	24,000	24,000	48,000
6	Manual Exercise	12,000	48,000	60,000
7	Test Fisioterapi	12,000	24,000	36,000
8	Infra Red	18,000	24,000	42,000
9	Elektro Terapi	24,000	24,000	48,000
10	Ultra Sound	24,000	36,000	60,000
11	Stimulasi	18,000	24,000	42,000
12	Sepeda Statis	60,000	36,000	96,000
13	Paraler Bar	36,000	60,000	96,000
14	Walker	60,000	60,000	120,000
15	Parafin Bath	120,000	60,000	180,000
16	Magneto Therapy	120,000	60,000	180,000
17	Gim Ball	60,000	120,000	180,000
18	Mirror Exercise	60,000	60,000	120,000

19 Tarif Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Harga Jual Obat Sumber Dana APBD adalah HET	70%	30%	100%
	- Acetosal 300mg	140	60	200
	- Acetosal 100mg	140	60	200
	- Acyclovir 400mg	560	240	800
	- Acyclovir 200mg	420	180	600
	- allopurinol 100mg	280	120	400
	- Atorvastatin 10 mg	2,450	1,050	3,500
	- Atorvastatin 20 mg	5,250	2,250	7,500
	- alprazolam 1mg	1,050	450	1,500

- Amikacin	22,400	9,600	32,000
- amlodipin 10 mg	2,100	900	3,000
- amlodipin 5mg	1,400	600	2,000
- ambroxol tablet	350	150	500
- Ambroxol Syr	4,900	2,100	7,000
- Aminofusin L 600	67,900	29,100	97,000
- Aminofusin Hepar	202,300	86,700	289,000
- Aminophylin inj	5,600	2,400	8,000
- Aminofusin PAED	91,000	39,000	130,000
- Aminofluid	163,100	69,900	233,000
- Amitripilin 25 mg tablet	140	60	200
- Amiodaron Tab (kendaron)	1,050	450	1,500
- Amiodaron HCL Injeksi	11,200	4,800	16,000
- Amoxan drops	19,600	8,400	28,000
- Amoxicillin 250 mg	560	240	800
- amoxicillin 500mg	350	150	500
- amoxicillin syr	3,500	1,500	5,000
- Ampicilin inj	9,100	3,900	13,000
- antalgin inj	1,400	600	2,000
- antasida syr	18,900	8,100	27,000
- antalgin tab	210	90	300
- antasida tablet	210	90	300
- Antihemoroid supp	3,500	1,500	5,000
- Albumin 25% (Octalbin)	966,000	414,000	1,380,000
- asam mefenamat 500mg	350	150	500
- Asering sol	22,400	9,600	32,000
- aqua pro inj	5,600	2,400	8,000
- Asam Tranexamat tab	1,750	750	2,500
- asam tranexamat inj	5,600	2,400	8,000
- Artesunate Inj	28,000	12,000	40,000
- Azytromicin	11,200	4,800	16,000
- Betahistin tab	1,050	450	1,500
- Bisoprolol 2,5mg	700	300	1,000
- Bisoprolol 5 mg	1,750	750	2,500
- Betametasone 0,1 % salep	2,100	900	3,000
- Bisacodyl tab	350	150	500
- Bupivakain inj (Bunascan)	65,100	27,900	93,000
- Catapres inj (Clonidin Inj)	46,900	20,100	67,000
- Cairan Ka- en 1 B	21,700	9,300	31,000
- Cairan Ka-en 3 A	21,700	9,300	31,000
- Cairan Ka-en 3 B	21,700	9,300	31,000
- Cairan Kaen 4 A	20,300	8,700	29,000
- cairan RL	7,000	3,000	10,000
- Calcii gluconas	16,100	6,900	23,000
- Candesartan 16 mg	7,000	3,000	10,000
- candesartan 8mg	4,900	2,100	7,000
- captopril 12,5	140	60	200
- Novomix	158,200	67,800	226,000
- Remdesivir inj (Cipremi)	1,429,400	612,600	2,042,000
- Captopril 25	140	60	200
- captopril 50	280	120	400
- Carbamazepine	280	120	400
- Chloramfenikol Salep kulit	11,900	5,100	17,000
- Chloramfenikol Salep Mata	1,400	600	2,000
- Chloramfenikol tetes telinga	6,300	2,700	9,000
- cefadroxyl caps 500 mg	1,400	600	2,000
- cefadroxyl caps 250 mg	700	300	1,000
- cefadroxyl syr 125mg/5ml	8,400	3,600	12,000
- cefixime syr	17,500	7,500	25,000
- Cefixime caps 200mg	4,200	1,800	6,000
- cefixime caps 100mg	1,400	600	2,000
- Ceftazidime inj	1,190	510	1,700

- Cefotaxime inj	8,400	3,600	12,000
- Cefoperazon inj	30,100	12,900	43,000
- Ceftriaxone inj	9,800	4,200	14,000
- Cefuroxime Inj (Anbacim)	73,500	31,500	105,000
- Cefuroxime Inj (Sharox)	64,400	27,600	92,000
- Cetirizine tab	350	150	500
- Cetirizine syr	10,500	4,500	15,000
- Chana (onoiwa)	4,900	2,100	7,000
- Citicoline tablet (Takelin)	8,400	3,600	12,000
- Citicoline inj	7,700	3,300	11,000
- Ciprofloxacin tab	420	180	600
- Ciprofloxacin inj	56,000	24,000	80,000
- Clyndamicin	1,050	450	1,500
- Clobazam 10mg	1,050	450	1,500
- Clopidogrel 75	18,200	7,800	26,000
- codein 10mg	630	270	900
- Codein 20mg	420	180	600
- combivent	7,700	3,300	11,000
- concor 2,5	630	270	900
- Corolene 3/0	66,500	28,500	95,000
- Corolene 6/0	79,100	33,900	113,000
- cotrimoxazol syr	4,200	1,800	6,000
- cotrimoxazole tab (Novatrim)	490	210	700
- ctm	280	120	400
- Cygest 400mg Ovula	23,800	10,200	34,000
- D 40%	8,400	3,600	12,000
- Depakote 250mg	7,000	3,000	10,000
- Depakote 500mg	14,000	6,000	20,000
- dexamethason tab	140	60	200
- dexamethasone inj	3,500	1,500	5,000
- Diamicron MR 60mg	2,800	1,200	4,000
- Digoxin tablet	140	60	200
- Diltiazem tab	210	90	300
- diphenhydramine inj	2,100	900	3,000
- Diazepam tablet 5 mg	210	90	300
- Diazepam inj 5 mg	7,700	3,300	11,000
- Diazepam inj 10 mg (Stesolid inj)	10,500	4,500	15,000
- Diazepam 5 mg (Stesolid rectal)	23,100	9,900	33,000
- Diazepam 10 mg (Stesolid rectal)	35,000	15,000	50,000
- Dobutamin inj	51,100	21,900	73,000
- Dopamin inj	35,700	15,300	51,000
- Dopamet (Metildopa) tab	1,820	780	2,600
- domperidone syr	11,200	4,800	16,000
- Domperidon drops	23,100	9,900	33,000
- domperidone tab	490	210	700
- Dulcolax supp	14,000	6,000	20,000
- Doxyciclyn tab	280	120	400
- Hyosine N-Butilbromide inj	6,300	2,700	9,000
- Ryzodeg Insulin	238,000	102,000	340,000
- Efedrin inj	6,300	2,700	9,000
- Erytromicin caps	1,330	570	1,900
- Erytromicin syr	7,700	3,300	11,000
- Epinefrin inj	3,150	1,350	4,500
- Farbion Injeksi	6,300	2,700	9,000
- Fartolin	16,800	7,200	24,000
- Farpresin (vasopresin) inj	79,100	33,900	113,000
- farelax inj (Artracurium)	74,900	32,100	107,000
- Fenitoin inj	23,100	9,900	33,000
- Fenitoin Tab	630	270	900
- Fentanyl Inj	32,900	14,100	47,000
- Furosemid tablet	140	60	200
- Furosemid inj	3,500	1,500	5,000

- Folavit tablet	840	360	1,200
- Fluconazol Infus	101,500	43,500	145,000
- Gastrul (Misoprostol)	11,900	5,100	17,000
- Gabapentin	4,900	2,100	7,000
- Gelafusin hepar	188,300	80,700	269,000
- Gentamicin inj	3,500	1,500	5,000
- Gliseril Guaiakolat	70	30	100
- Gentamicin salep kulit	3,500	1,500	5,000
- Genoint Salep mata	7,700	3,300	11,000
- Glimepiride 2mg	1,400	600	2,000
- Glikuidone tab	700	300	1,000
- glukosa 10%	5,600	2,400	8,000
- glukosa 5%	7,000	3,000	10,000
- Glukosa 40% (D40)	9,100	3,900	13,000
- Gudel	11,200	4,800	16,000
- Haloperidol tab 1,5mg	140	60	200
- Heparin Sodium	65,100	27,900	93,000
- Hemafort	1,400	600	2,000
- Hidrocortison salep	2,800	1,200	4,000
- Histolan Tab	4,900	2,100	7,000
- ibuprofen 400mg	280	120	400
- Ibuprofen sirup	3,500	1,500	5,000
- isosorbide dinitrate (ISDN)	140	60	200
- Kalk	210	90	300
- Kaltropen supp (Suprafenid)	9,800	4,200	14,000
- KCl injeksi	8,400	3,600	12,000
- Kenalog Salep	50,400	21,600	72,000
- Ketamin inj	149,800	64,200	214,000
- Ketoconazole salep	6,300	2,700	9,000
- Ketoconazole tab	490	210	700
- ketorolac inj	2,100	900	3,000
- KSR	2,800	1,200	4,000
- Lacidofil	6,300	2,700	9,000
- Lacto - B	5,600	2,400	8,000
- L-cisin (Colchisin)	3,500	1,500	5,000
- lansoprazole	1,400	600	2,000
- levemir	178,500	76,500	255,000
- Levofloxacin inj	77,000	33,000	110,000
- levofloxacin tab	1,400	600	2,000
- lidocain inj	1,890	810	2,700
- Lisinopril 10 mg	560	240	800
- Lisinopril 5 mg	490	210	700
- Loratadine tab	350	150	500
- Loperamid tab	140	60	200
- Manitol 20	54,600	23,400	78,000
- Meropenem inj 1 g	67,900	29,100	97,000
- Meropenem inj 0,5 g	56,700	24,300	81,000
- Gabaxa	246,400	105,600	352,000
- Farbivent	10,500	4,500	15,000
- Mersibion tablet	1,400	600	2,000
- Metoclorpromide tab	140	60	200
- Metoclorpromide drops (Gavistal)	10,500	4,500	15,000
- methylergometrine inj	2,100	900	3,000
- methylergometrine tab	84	36	120
- metilprdenisolon 4 mg tablet	280	120	400
- methylprednisolon tab 8mg	560	240	800
- methylprednisolon tab 16mg	1,400	600	2,000
- methylprednisolon inj	16,800	7,200	24,000
- Metformin HCl	280	120	400

- Metronidazole infus	7,000	3,000	10,000
- Metronidazole 250mg	140	60	200
- Metronidazole ovula (Vagizol)	11,900	5,100	17,000
- metronidazole 500mg tab	350	150	500
- Meloxicam 7,5mg tab	1,400	600	2,000
- Meloxicam 15 mg tab	1,400	600	2,000
- Meylon 8 4	14,000	6,000	20,000
- Miconazole cream 2%	3,500	1,500	5,000
- Miniaspi 80mg (Aspilet)	420	180	600
- MgSO4 20%	9,100	3,900	13,000
- MgSO4 40%	9,100	3,900	13,000
- Midazolam inj	18,900	8,100	27,000
- Misoprostol (Gastrul) tab	10,500	4,500	15,000
- Myconis Drops	36,400	15,600	52,000
- Morfin inj	31,500	13,500	45,000
- NaCl 3% (salin)	27,300	11,700	39,000
- NaCl 0,9%	6,300	2,700	9,000
- natrium diklofenak	210	90	300
- Neurosanbe 5000 capsul	2,800	1,200	4,000
- Neurosanbe capsul	1,400	600	2,000
- Nicardipin inj	140,700	60,300	201,000
- Nitrokaf Forte 5 mg	4,200	1,800	6,000
- Nitrokaf 2.5 mg	2,800	1,200	4,000
- Novalgin Inj	11,200	4,800	16,000
- Novorapid	158,200	67,800	226,000
- Norepinefrin Inj	53,900	23,100	77,000
- Notrixum inj (Artracurium)	46,200	19,800	66,000
- Nokoba Inj	98,700	42,300	141,000
- nifedipine	280	120	400
- omeprazole caps	420	180	600
- omeprazole vial	19,600	8,400	28,000
- Ondancetron tab 4 mg	2,100	900	3,000
- Ondancetron tab 8 mg	2,800	1,200	4,000
- Ondancetron Inj	2,800	1,200	4,000
- oralit	420	180	600
- Oxytocin inj	1,400	600	2,000
- paracetamol 100mg tab	70	30	100
- paracetamol syr	2,800	1,200	4,000
- paracetamol tab 500mg	560	240	800
- Paracetamol Infus	56,000	24,000	80,000
- Paracetamol drops (turpas)	21,700	9,300	31,000
- Phenobarbital inj	2,800	1,200	4,000
- Pehacain Inj	2,800	1,200	4,000
- piracetam inj 200mg/ml (15ml)	15,400	6,600	22,000
- Piracetam Inj 200mg/ml (5ml)	5,600	2,400	8,000
- Piracetam 400mg tablet	490	210	700
- Piracetam 800mg tablet	1,400	600	2,000
- Piracetam 1200mg tablet	1,400	600	2,000
- Piroxicam 10mg tab	140	60	200
- prednison	420	180	600
- N-Ace	2,800	1,200	4,000
- Remedia	357,000	153,000	510,000
- Profolat (Asam Folat) tab	560	240	800
- Propofol	71,400	30,600	102,000
- Propanolol 10mg tab	280	120	400
- Propanolol 40mg tab	140	60	200

- Primolut N tablet	4,900	2,100	7,000
- Pularex (Attapulgit)	1,400	600	2,000
- Pulmicort Nebu	19,600	8,400	28,000
- pyrantel pamoate	350	150	500
- PTU	490	210	700
- Remdesivir inj (Cipremi)	432,600	185,400	618,000
- Ramipril 2,5 tab	350	150	500
- Ramipril 5 tab	490	210	700
- ranitidin inj	2,800	1,200	4,000
- ranitidin tab	210	90	300
- Risperidone 2 mg	2,100	900	3,000
- Rivanol 300 cc	2,800	1,200	4,000
- Rocum (Rocuranium) inj	113,400	48,600	162,000
- RDS (wida)	11,900	5,100	17,000
- Sulfas Atropine inj	2,100	900	3,000
- Sulfadiazin Cream	18,900	8,100	27,000
- Salep 2-4	1,400	600	2,000
- Sangobion Capsul	1,400	600	2,000
- salbutamol	210	90	300
- Sevofluran	11,200	4,800	16,000
- Servical collar	81,900	35,100	117,000
- Scopamin tablet	2,100	900	3,000
- simvastatin 10mg	490	210	700
- simvastatin 20mg	1,400	600	2,000
- Spironolacton 25 mg	350	150	500
- Spironolacton 100 mg	1,400	600	2,000
- Stesolid 10 mg Rectal	34,300	14,700	49,000
- Stesolid Rectal 5mg	23,100	9,900	33,000
- Sucralfat syr	17,500	7,500	25,000
- Sulfadoxin tab	490	210	700
- Tablet Tambah darah	490	210	700
- Terbutalin inj 0.5mg/ml	8,400	3,600	12,000
- Tetagam Vaksin 250 UI	202,300	86,700	289,000
- Three way	4,900	2,100	7,000
- tramadol tab (Dolgesik)	2,800	1,200	4,000
- tramadol Inj (Dolgesic)	11,200	4,800	16,000
- Trampara tablet	4,900	2,100	7,000
- Vagizol supp	11,900	5,100	17,000
- Valsartan 80mg tab	4,200	1,800	6,000
- ventolin	8,400	3,600	12,000
- VIP Albumin Tablet	5,600	2,400	8,000
- Vitamin A Kapsul lunak	1,400	600	2,000
- vit b kompleks tab	700	300	1,000
- vit. B1 tablet	140	60	200
- vit B6	140	60	200
- vit B12 tab	140	60	200
- vit c 50 mg tab	140	60	200
- vit.k inj	4,200	1,800	6,000
- vit.k tablet	700	300	1,000
- WIDA (HES) Voluven	163,800	70,200	234,000
- Xylocain gel	52,500	22,500	75,000
- zinc tab	630	270	900
- Zinc syr	7,700	3,300	11,000
- jasa racikan	490	210	700
- zegavit	3,500	1,500	5,000
- meviton	1,610	690	2,300

	- Valsartan 160 mg	8,400	3,600	12,000
	- Vit D3 1000	6,650	2,850	9,500
	- Pavifiravir	13,300	5,700	19,000
2	Harga Jual BHP Sumber Dana APBD adalah harga pembelian/Ekatalog di tambah 40%	65%	35%	100%
	- abocath 18	5,850	3,150	9,000
	- abocath 18 (jaya mas)	5,850	3,150	9,000
	- abocath 22 (jaya mas)	5,850	3,150	9,000
	- abocath 24 (jaya mas)	4,550	2,450	7,000
	- Jayamas Steracath IV catheher 18 G	5,850	3,150	9,000
	- Jayamas Steracath IV catheher 20 G	5,850	3,150	9,000
	- Jayamas Steracath IV catheher 22 G	4,550	2,450	7,000
	- Jayamas Steracath IV catheher 24 G	5,850	3,150	9,000
	- Jayamas Steracath IV catheher 26 G	4,550	2,450	7,000
	- Alkohol 70 % 1 L New	50,700	27,300	78,000
	- Alkohol swab new 2	455	245	700
	- Antiseptik Handrub (new)	53,950	29,050	83,000
	- Antiseptik Skin Cleanser (new)	65,000	35,000	100,000
	- Antiseptik handscrub new	65,000	35,000	100,000
	- Arm Sling S	65,000	35,000	100,000
	- Arm Sling M	13,650	7,350	21,000
	- Arm Sling L	13,650	7,350	21,000
	- apron one med Plastik	6,500	3,500	10,000
	- Apron lengan panjang	6,500	3,500	10,000
	- Aesculap Bisturi NO. 10 -20	6,500	3,500	10,000
	- Baju APD Coverall (L) type 1412	4,550	2,450	7,000
	- Baju APD Coverall (XL) type 1412	139,750	75,250	215,000
	- Brecelet Insert Card, Adult- Blue	139,750	75,250	215,000
	- Brecelet Insert Card, Adult-Pink	650	350	1,000
	- Brecelet Insert Card, Child- Blue	650	350	1,000
	- Brecelet Insert Card, Child-Pink	650	350	1,000
	- Canul bayi	5,200	2,800	8,000
	- canul anak	5,200	2,800	8,000
	- Oxygen nasal Canulla white tubing , Adult	6,500	3,500	10,000
	- Oxygen nasal Canulla white tubing , Child	6,500	3,500	10,000
	- Oxygen nasal Cannula white tubing, Neonates	7,800	4,200	12,000
	- Carbon Steel 15 (Bisturi)	3,250	1,750	5,000
	- Catgut Chromic 4/0+jarum (Demegut)	26,000	14,000	40,000
	- Catgut Plain with Needle 2.0	5,850	3,150	9,000
	- Catgut Plain with Needle 3.0	5,850	3,150	9,000
	- Catgut Chromic with Needle 2.0	7,150	3,850	11,000
	- Catgut Chromic with Needle 3.0	7,150	3,850	11,000
	- Cervical Collar Universal	98,800	53,200	152,000
	- Connection suction 300 cm	18,850	10,150	29,000
	- Connection suction KMP	18,200	9,800	28,000
	- daryant-Tulle Sterile	17,550	9,450	27,000
	- Dispo 50cc (Cateter Tip)	7,150	3,850	11,000
	- Dispo 50cc	3,250	1,750	5,000
	- Dispo 50cc (stera)	3,900	2,100	6,000
	- Dispo 20cc	1,300	700	2,000
	- Dispo 20cc (stera)	1,950	1,050	3,000
	- Dispo 10 cc (TP Disposable Syringe)	1,300	700	2,000
	- Dispo 5 cc (TP Disposable Syringe)	1,300	700	2,000
	- Dispo 1 cc (TP Disposable Syringe)	1,300	700	2,000

- Dispo 2,5 (TP Disposble Syringe)	1,300	700	2,000
- Dermafix t 10x 25 cm	26,000	14,000	40,000
- Dermafix 10 x 25 cm (One Med)	14,300	7,700	22,000
- Mitra Rajawali RD alat suntik with needle 3 ml	1,300	700	2,000
- Mitra Rajawali RD alat suntik with needle 10 ml	1,300	700	2,000
- Jayamas Syringe Stera 1 CC	1,300	700	2,000
- Jayamas Syringe Stera 3 CC	1,300	700	2,000
- Jayamas Syringe Stera 10 CC	1,300	700	2,000
- Jayamas Steracath IV catheher 18 G	5,850	3,150	9,000
- Jayamas Steracath IV catheher 20 G	5,850	3,150	9,000
- Jayamas Steracath IV catheher 22 G	4,550	2,450	7,000
- Jayamas Steracath IV catheher 24 G	4,550	2,450	7,000
- Jayamas Steracath IV catheher 26 G	4,550	2,450	7,000
- Ecodine onemed 1L	87,750	47,250	135,000
- Eko Gips 5 cm new	27,950	15,050	43,000
- Eko Gips7.5 cm (new)	33,800	18,200	52,000
- Eko Gips 10 cm (new)	45,500	24,500	70,000
- Eko Gips 15 cm new	60,450	32,550	93,000
- Eko Gips 20 cm	44,850	24,150	69,000
- Eko Gips 20 cm (new)	68,900	37,100	106,000
- EKG Paper tipe 050R30-H00	22,750	12,250	35,000
- Elektroda (Skintach)	2,600	1,400	4,000
- Ethyl Chlorida Spray	148,200	79,800	228,000
- EMP Connection Suct 300 CM	18,850	10,150	29,000
- EKG paper ECG GE MAC 80 mm x 90 mm x 280 sheets	93,600	50,400	144,000
- ETT no. 4.0	19,500	10,500	30,000
- ETT no. 4.5	19,500	10,500	30,000
- ETT no. 4.0 new	23,400	12,600	36,000
- ETT no. 4.5 new	23,400	12,600	36,000
- ETT no. 5.0	19,500	10,500	30,000
- ETT no. 5.0 new	23,400	12,600	36,000
- ETT no. 5.5	19,500	10,500	30,000
- ETT no. 5.5 new	23,400	12,600	36,000
- ETT no. 7	9,750	5,250	15,000
- ETT no. 7.5	9,750	5,250	15,000
- ETT no. 8	9,750	5,250	15,000
- Film Drystar 25x30 GF	2,957,500	1,592,500	4,550,000
- Film Drystar 25x30 GF (New)	2,957,500	1,592,500	4,550,000
- Fixomull Stretch 15 cm x 5 m	94,900	51,100	146,000
- Fixomull Stretch 10 cm x 5 m	60,450	32,550	93,000
- Fixomull Stretch 5 cm x 5 m	31,850	17,150	49,000
- folley catheter 10	20,800	11,200	32,000
- folley catheter 12	20,800	11,200	32,000
- folley catheter 12 new	20,800	11,200	32,000
- folley catheter 14	20,800	11,200	32,000
- folley catheter 14 new	20,800	11,200	32,000
- folley catheter 10ml/cc 2 ways fr16	20,800	11,200	32,000
- folley catheter 10ml/cc 2 ways fr18	20,800	11,200	32,000
- Gudel airway 40 mm dips steril	11,050	5,950	17,000
- Gudel airway 40 mm dips steril new	13,650	7,350	21,000
- Gudel airway 50 mm dips steril new	13,650	7,350	21,000
- Gudel airway 60 mm dips steril	11,050	5,950	17,000
- Gudel airway 60 mm dips steril new	13,650	7,350	21,000
- Gudel airway 70 mm dips steril	11,050	5,950	17,000

-	Gudel airway 70 mm dips steril new	13,650	7,350	21,000
-	Gudel airway 80 mm dips steril	11,050	5,950	17,000
-	Gudel airway 80 mm dips steril new	13,650	7,350	21,000
-	Gudel airway 90 mm dips steril	11,050	5,950	17,000
-	Gudel airway 90 mm dips steril new	13,650	7,350	21,000
-	Gudel airway 100 mm dips steril	11,050	5,950	17,000
-	Gudel airway 100 mm dips steril new	13,650	7,350	21,000
-	Gudel airway 110 mm dips steril	11,050	5,950	17,000
-	Gudel airway 110 mm dips steril new	13,650	7,350	21,000
-	Hand Desinfektan (Bbraun Softa-Man 500 ml)	61,750	33,250	95,000
-	Handscoen M Maxter exsamination 100 BH	1,300	700	2,000
-	Handscoen Non steril	2,600	1,400	4,000
-	Handscoen Non steril M	1,950	1,050	3,000
-	Handscoen Steri (Surgical Gloves)	9,750	5,250	15,000
-	Hazmat BOHO	193,050	103,950	297,000
-	Hazmat Mikrotex	169,000	91,000	260,000
-	Hipafix	92,950	50,050	143,000
-	Top Glove Surgi glove 6,5	4,550	2,450	7,000
-	Top Glove Surgi glove 7,0 New	4,550	2,450	7,000
-	Top Glove Surgi glove 7,5 New	4,550	2,450	7,000
-	Top Glove Surgi glove 7,5 (E-CARE)	4,550	2,450	7,000
-	Infus set dewasa (one med)	5,200	2,800	8,000
-	infus set mikro	3,900	2,100	6,000
-	Kapas 500 g	23,400	12,600	36,000
-	kapas Pembalut 500 g (new)	48,750	26,250	75,000
-	Kasa pembalut Hidrofil 40yardx80cm	111,150	59,850	171,000
-	Kasa pembalut Hidrofil 40x80 cm (New)	143,000	77,000	220,000
-	Kasa pembalut Hidrofil 4mx5cm	650	350	1,000
-	Kasa pembalut Hidrofil 4mx10cm	1,300	700	2,000
-	Kasa Steril	6,500	3,500	10,000
-	Kaset Rontgen Uk 24x30- GF	26,650,000	14,350,000	41,000,000
-	Kaset Rontgen Uk 35x43- GF	33,800,000	18,200,000	52,000,000
-	Masker Prongs Nasal S	353,600	190,400	544,000
-	Masker Bedah 3 Ply (Anara Mask))	1,950	1,050	3,000
-	Masker Bedah 3 PLY Wellnes	1,950	1,050	3,000
-	Masker Bedah (One Med)	1,300	700	2,000
-	Masker Nebulizer Anak	10,400	5,600	16,000
-	Masker Nebulizer Dewasa	11,050	5,950	17,000
-	Masker Oksigen Bayi (Maxiflow)	12,350	6,650	19,000
-	Masker Oksigen anak (Maxiflow)	11,700	6,300	18,000
-	Masker Oksigen anak	7,800	4,200	12,000
-	Masker Oksigen dws (Maxiflow)	7,800	4,200	12,000
-	Masker KN95	9,750	5,250	15,000
-	Masker N95 new	44,200	23,800	68,000
-	Masker N95 One med	46,800	25,200	72,000
-	Nasal Prongs S	353,600	190,400	544,000
-	Nasal Prong Pigeon	306,800	165,200	472,000
-	Nasal Oxygen Size L (aximed)	7,800	4,200	12,000
-	Nasal Oxygen Size XS (aximed)	7,800	4,200	12,000
-	Nasal Oxygen 02 anulla size M (aximed)	7,800	4,200	12,000
-	Nasal Oxygen 02 anulla size S (aximed)	7,800	4,200	12,000
-	Nasal Oxygen Bayi (Basmed Oxyflow)	5,850	3,150	9,000
-	Nasal Oxygen anak (Basmed Oxyflow)	5,850	3,150	9,000
-	Nasal Oxygen Dewasa (Basmed Oxyflow)	5,850	3,150	9,000
-	Novotwist (BD micro pen Needle)	1,950	1,050	3,000

- Nurse Cap	390	210	600
- Nurse Cup (New)	390	210	600
- NGT 18 (Stomach Tube) 125 cm	8,450	4,550	13,000
- NGT 12 (Stomach Tube)	7,150	3,850	11,000
- NGT T16 (Stomach Tube aximed) New	8,450	4,550	13,000
- NGT T18 (Stomach Tube aximed) New	5,200	2,800	8,000
- NGT T8 (Feeding Tube)	6,500	3,500	10,000
- NGT T5 (Feeding Tube) 100 cm	8,450	4,550	13,000
- NGT no. 5 (new)	8,450	4,550	13,000
- NGT no. 18 (new)	8,450	4,550	13,000
- NGT No. 10 (Aximed 100)	9,100	4,900	14,000
- NGT NO. 8 (Aximed 40)	8,450	4,550	13,000
- NGT No 6 (aximed feeding tube) 100 m	9,100	4,900	14,000
- NRM Anak new	13,650	7,350	21,000
- NRM Dewasa (HI Oxy Dewasa)	24,700	13,300	38,000
- Plester roll 5	22,100	11,900	34,000
- plester roll 7,5	22,100	11,900	34,000
- plester roll 7,5	26,650	14,350	41,000
- Plat Cauter / esu cauter	49,400	26,600	76,000
- Pen Couter	92,950	50,050	143,000
- Poliban 5 cm x 2,7 m	6,500	3,500	10,000
- Advacryl 1	54,600	29,400	84,000
- Advacryl 2-0	54,600	29,400	84,000
- Advacryl 3-0	53,300	28,700	82,000
- catgut chromic 2-0	29,900	16,100	46,000
- advalene blue 2-0 taper	50,050	26,950	77,000
- advalene blue 3-0 cutting	49,400	26,600	76,000
- advalene blue 4-0 cutting	68,900	37,100	106,000
- advalene blue 5-0 cutting	82,550	44,450	127,000
- Poliban 10 cm x 2,7 m	10,400	5,600	16,000
- Poliban 7,5 cm x 2,7 m	13,000	7,000	20,000
- Poliban 15 cm x 2,7 m	17,550	9,450	27,000
- Polifix 15 m x 5 m	89,050	47,950	137,000
- Polifix 10 cm x 5 cm	65,650	35,350	101,000
- polifix 5 cm x 5 cm	35,100	18,900	54,000
- Plesterin Bulat Non Woven	195	105	300
- Plesterin Bulat Non Woven New	195	105	300
- Polygyp 5 cm x 2,7 m	9,100	4,900	14,000
- Poligyp 7,5 cm x 2,7 m	13,650	7,350	21,000
- Poligyp 10 cm x 2,7 m	18,850	10,150	29,000
- Poligyp 15 cm x 2,7 m	24,700	13,300	38,000
- Polycrape 7,5 cm x 4,55 m	24,700	13,300	38,000
- Polycrape 7,5 cm x 4,55 m	29,250	15,750	45,000
- Polycrape 10 cm x 4,55 m	29,250	15,750	45,000
- Polycrape 10 cm x 4,55 m (New)	24,700	13,300	38,000
- Polycrape 15 cm x 4,55 m	37,700	20,300	58,000
- POLIWASH 500 ml	49,400	26,600	76,000
- Povidon iodine 10 % 1 L	63,700	34,300	98,000
- Povidon iodine 1000 ml	76,700	41,300	118,000
- PGA 3/0 75+jarum 1/2 22 M (Demesorb)	39,650	21,350	61,000
- Prolene BLU 45cm 2-0 FS	55,250	29,750	85,000
- Prolene BLU 100cm M4 1 CT	69,550	37,450	107,000
- Prolene 3-0 26MM REV CUT	64,350	34,650	99,000
- Prolene 3-0 26 mm Rev Cut (W8684)	170,300	91,700	262,000
- Prolene Blue 45 cm 2-0 fs (8685H)	113,750	61,250	175,000
- Prolene Blue 100 cm M4 1 Ct (W742)	124,150	66,850	191,000

- Protektive/ Safety cloth	1,587,300	854,700	2,442,000
- Protektive/ Safety cloth (APD)	2,408,250	1,296,750	3,705,000
- novotwist	1,950	1,050	3,000
- Safety Box	15,600	8,400	24,000
- Safeglove Exam (Handscoon non steril S)	1,300	700	2,000
- sarung tangan obsgyn (Handscoon obgyn)	45,500	24,500	70,000
- Shoe Cover Non moven	2,600	1,400	4,000
- Sodasorb CO2 Absorbent	392,600	211,400	604,000
- silk 3/0	5,200	2,800	8,000
- Surgical suture	144,300	77,700	222,000
- Surgical Gown Spuncle (one Med)	58,500	31,500	90,000
- Surgical Gown (L)	72,800	39,200	112,000
- Surgical Gown (M)	72,800	39,200	112,000
- Surgical Gown New	76,700	41,300	118,000
- Sharp Container 1 L	16,900	9,100	26,000
- Skintach Foam 43x51 MM	2,600	1,400	4,000
- Surgical Gloves 6,5	5,200	2,800	8,000
- Spinocain G 25	21,450	11,550	33,000
- Spinocain G 25 "clear hub"	27,950	15,050	43,000
- Spinocain G 26 "clear hub"	27,950	15,050	43,000
- Spinocain G 27x3	35,750	19,250	55,000
- Spinocain G 27 "clear hub"	34,450	18,550	53,000
- Remedi IV Catheher Flash back 18 G	4,550	2,450	7,000
- Remedi IV Catheher Flash back 24 G	4,550	2,450	7,000
- Remedi Flash Back IV Cannula 26 G	4,550	2,450	7,000
- Remedi IV catheter Flash Back model 20 G	4,550	2,450	7,000
- Remedi IV catheter Flash Back model 22 G	4,550	2,450	7,000
- Termometer Pendingin	158,600	85,400	244,000
- Termometer ruangan + Kelembapan	390,650	210,350	601,000
- Transfusion Blood set	3,250	1,750	5,000
- Three way Stop Cock with Tube (new)	3,900	2,100	6,000
- Underpad 60 x 90 (One Med softpad)	4,550	2,450	7,000
- Urine bag steril new	7,150	3,850	11,000
- Umblical cord klem	1,950	1,050	3,000
- USG-Sony Kertas	297,700	160,300	458,000
- USG Paper (ungu) 110X18 new	297,700	160,300	458,000
- USG Paper (silver)	297,700	160,300	458,000
- USG Gel 250 ml (One Med Ultrasoni)	18,200	9,800	28,000
- USG Gel 250 ml (new)	14,300	7,700	22,000
- Venflon IV 18 GA	14,950	8,050	23,000
- Vicryl Plus Suture 27 in (70cm) 3-0 VIO (VCP452) New	76,700	41,300	118,000
- Vicryl Plus Suture 27 in (70cm) 2-0 VIO (VCP317H) New	58,500	31,500	90,000
- Vicryl Plus vio 90 cm 1 CTX (VCP371H) New	96,200	51,800	148,000
- Vicryl Plus Vio 70 cm 0 CT-1 (VCP340H) New	55,250	29,750	85,000
- Vicryl Plus Suture 27 in (70cm) 3-0 VIO (VCP311H) New	137,800	74,200	212,000
- Cervical Collar Universal	98,800	53,200	152,000
- Suction Chateter no. 6 (aximed)	8,450	4,550	13,000
- Suction Chateter no. 8 with finger tube	3,250	1,750	5,000
- Suction Chateter no.10 with finger tube	3,250	1,750	5,000
- Suction Chateter no. 12	3,250	1,750	5,000
- Suction Chateter no. 14	3,250	1,750	5,000

-	Suction Chateter no. 16	3,250	1,750	5,000
-	Suction Chateter no. 16 new	3,900	2,100	6,000
-	Suction Chateter no. 8 (aximed)	3,250	1,750	5,000
-	Suction Chateter no. 16 (aximed)	8,450	4,550	13,000
-	Masker Anastesi No. 3	27,300	14,700	42,000
-	Masker Anastesi No. 4	27,300	14,700	42,000
-	Masker Anastesi No. 5	27,300	14,700	42,000
-	Masker Anastesi No. 6	27,300	14,700	42,000
-	Masker Anastesi No. 4 small adult	32,500	17,500	50,000
-	Masker Anastesi No. 4 medium adult	32,500	17,500	50,000
-	Masker Anastesi No. 4 large adult	32,500	17,500	50,000
-	Masker Anastesi No. 4 child	32,500	17,500	50,000
-	Paper EKG 14.5 x 30 m	186,550	100,450	287,000
-	Paper EKG 21.5 x 30 m	170,950	92,050	263,000
-	LMA Supremes Size 3.0	404,300	217,700	622,000
-	LMA Supremes Size 3.0 (new)	297,700	160,300	458,000
-	LMA Supremes Size 4.0	404,300	217,700	622,000
-	LMA Supremes Size 4.0 (new)	297,700	160,300	458,000
-	LMA Supremes Size 5.0	404,300	217,700	622,000
-	LMA Supremes Size 5.0 (new)	260,000	140,000	400,000
-	Anasthesi Breathing Circuit Adult	68,900	37,100	106,000
-	Anasthesi Breathing C. Pediatric	68,900	37,100	106,000
-	Anasthesi Breathing with extlimb adult	130,000	70,000	200,000
-	Anasthesi Breathing with extlimb Ped	130,000	70,000	200,000
-	Anasthesi Flow Dewasa	131,300	70,700	202,000
-	Anasthesi Flow Dewasa	131,300	70,700	202,000
-	Kertas Puyer Obat	29,900	16,100	46,000
-	Hospitech ID Band Adult/child	1,300	700	2,000
-	Dermafix t 10x 12 cm	13,000	7,000	20,000
3	Racikan Pembungkus/Kapsul	300	1000	13000
4	Visite Apoteker	10,000	30,000	40,000
5	Obat/Konseling per Resep	2,000	10,000	12,000
6	Dispensing Sediaan Steril/Sediaan	2,000	8,000	10,000

20 Tarif Penggunaan Oksigen

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Penggunaan Oksigen/jam	24,000	6,000	30,000
2	Penggunaan Oksigen/liter	350	300	650

21 Tarif Pelayanan Gizi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Gizi Biasa			
	- Kelas II	10,000	10,000	20,000
	- Kelas I/HCU	15,000	15,000	30,000

	- VIP	20,000	20,000	40,000
2	Pelayanan Gizi dengan Komplikasi			
	- Kelas II	15,000	15,000	30,000
	- Kelas I/HCU	20,000	20,000	40,000
	- VIP	25,000	25,000	50,000
	- Poliklinik Gizi	10,000	10,000	20,000

22 Tarif Pelayanan Sanitasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Sanitasi			
	- Kelas II	10,000	10,000	20,000
	- Kelas I	10,000	10,000	20,000
	- VIP	10,000	10,000	20,000

23 Tarif Unit Transfusi Darah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD)	250,000	240,000	490,000

24 Keur Kesehatan Dan Medical Check Up

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum (tidak termasuk pemeriksaan penunjang) meliputi:			
	a. Fisik	25,000	75,000	75,000
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum Haji meliputi:			
	a. Fisik	25,000	75,000	100,000
	b. Hematologi Lengkap	60,000	40,000	100,000
	c. Fungsi Hati	50,000	24,000	74,000
	d. Fungsi Ginjal	81,000	44,000	125,000
	e. Foto Thorax	55,000	80,000	135,000
	f. EKG	40,000	60,000	100,000
3	Paket I (Sederhana) meliputi:			
	a. Fisik	25,000	75,000	100,000
	b. Hematologi	50,000	20,000	70,000
	c. Fungsi Hati	50,000	24,000	74,000
	d. Fungsi Ginjal	81,000	44,000	125,000
	e. Foto Thorax	55,000	80,000	135,000
	f. EKG	40,000	60,000	100,000
4	Paket II (Sedang) meliputi:			
	a. Fisik	25,000	75,000	100,000
	b. Hematologi	50,000	20,000	70,000
	c. Fungsi Hati	50,000	24,000	74,000

	d. Fungsi Ginjal	81,000	44,000	125,000
	e. Lemak Darah	138,000	62,000	200,000
	f. Foto Thorax	55,000	80,000	135,000
	g. EKG	40,000	60,000	100,000
5	Paket III Lengkap (Untuk Laki-laki) meliputi:			
	a. Fisik	25,000	75,000	100,000
	b. Hematologi	50,000	20,000	70,000
	c. Fungsi Hati	50,000	24,000	74,000
	d. Fungsi Ginjal	81,000	44,000	125,000
	e. Lemak Darah	138,000	62,000	200,000
	f. Profil Hepatitis	90,000	40,000	130,000
	g. Foto Thorax	55,000	80,000	135,000
	h. EKG	10,000	60,000	70,000
	(Untuk Perempuan)			
	a. Fisik	25,000	75,000	100,000
	b. Hematologi	50,000	20,000	70,000
	c. Fungsi Hati	50,000	24,000	74,000
	d. Fungsi Ginjal	81,000	44,000	125,000
	e. Lemak Darah	138,000	62,000	200,000
	f. Profil Hepatitis	90,000	40,000	130,000
	g. Foto Thorax	55,000	80,000	135,000
	h. EKG	10,000	60,000	70,000

25 Tarif Pelaya

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Perawatan Jenazah Tanpa Pengafanan	60,000	120,000	180,000
2	Perawatan Jenazah dengan Pengafanan	180,000	240,000	420,000
3	Pengawetan Jenazah / Pemberian Formalin	240,000	360,000	600,000
4	Kamar Jenazah	100,000	-	100,000

26 Tarif Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Ambulance Dalam Kota (Maks 10 km)	30,000	20,000	50,000
2	Mengantar Jemput Pasien Luar Kota (> 10 km) Mobil Jenazah	2000/Km	3000/Km	5.000/Km
3	Mengantar Jenazah Dalam Kota (Maks 10 km)	30,000	40,000	70,000

4	Mengantar Jenazah Luar Kota (Lebih 10 km)	3000/Km	3000/Km	6.000/Km
Catatan : BBM untuk luar Kota belum termasuk				

27 Tarif Pelayanan Rujukan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Rujukan Ke Luwuk		500,000	500,000
	Catatan : (Pendampingan Pasien Rujukan diluar tiket kapal)			

28 Tarif Medical Legal

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Visum Et Repertum	20,000	25,000	45,000
2	Dokter		90,000	90,000
3	Perawat		30,000	30,000
4	Non Perawat		25,000	25,000
5	Otopsi	300,000	700,000	1,000,000

29 Tarif Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana			
	Kelas II	20,000	30,000	50,000
	Kelas I	25,000	30,000	55,000
	Kelas Utama B	25,000	35,000	60,000
	Kelas Utama A	25,000	40,000	65,000
2	Sedang			
	Kelas II	40,000	80,000	120,000
	Kelas I	60,000	85,000	145,000
	Kelas Utama B	60,000	95,000	155,000
	Kelas Utama A	60,000	105,000	165,000
3	Canggih			
	Kelas II	90,000	100,000	190,000
	Kelas I	95,000	115,000	210,000
	Kelas Utama B	100,000	120,000	220,000
	Kelas Utama A	105,000	130,000	235,000

B. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF JASA		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
A	Poliklinik				
	1	Pemeriksaan Poliklinik	5,000	10,000	15,000
	2	Pelayanan UGD			
		- Pemeriksaan Perawat	10,000	20,000	30,000
		- Pemeriksaan Dokter	5,000	20,000	25,000
B	Pemeriksaan untuk Tujuan Tertentu				
	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat		7000	10000	17,000
	Visum et repertum		15,000	20,000	35,000
	- Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Visum Hidup		15,000	20,000	35,000
	- Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Visum Meninggal		15,000	20,000	35,000
C.	Poliklinik Kebidanan, Kandungan dan Persalinan Normal				
	1	Vagina Toilet	15,000	25,000	40,000
	2	Pemasangan IUD	50,000	100,000	150,000
	3	Pemasangan INPLANT	65,000	120,000	185,000
	4	Pencabutan IUD	20,000	80,000	100,000
	5	Pencabutan INPLANT	40,000	80,000	120,000
	6	Suntik KB	10,000	20,000	30,000
	7	Papsmear	25,000	50,000	75,000
	8	Pemeriksaan IVA	25,000	75,000	100,000
	9	Persalinan Normal			
		a. Ditolong Bidan	150,000	250,000	400,000
		b. Ditolong Dokter Umum	150,000	300,000	450,000
		c. Ditolong Dokter Ahli	175,000	325,000	500,000
		d. Resusitasi Neonatus	100,000	150,000	250,000
	10	Induksi Persalinan	60,000	150,000	210,000
	11	Pelayanan PNC	10,000	60,000	70,000
	12	Pelayanan ANC	10,000	50,000	60,000
	13	MANUAL PLACENTA	10,000	20,000	30,000
	14	Persalinan Patologi	100,000	300,000	400,000

D. Tarif Pemeriksaan Laboratorium				
a).	Darah Rutin			
	1	Hemaglobin	5,000	7,000
	2	Letukosit	5,000	7,000
	3	Trombosit	5,000	7,000
	4	Diffresial	5,000	7,000
	5	Laju endap darah	5,000	7,000
	6	Erytosit	5,000	7,000
	7	Hematoktir	5,000	7,000
	8	CT (waktu bekuan)	5,000	7,000
	9	BT (waktu perdarahan)	5,000	7,000
	10	DDR (Malaria)	15,000	15,000
b).	Urinilisis			
	1	Protein Urine	5,000	7,000

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF JASA		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
	2	Reduksi Urine	5,000	7,000	12,000
	3	Urobilin Urine	5,000	7,000	12,000
	4	Bilirubin Urine	5,000	7,000	12,000
	5	Aseton Urine	5,000	7,000	12,000
	6	Urine Sedime	5,000	7,000	12,000
c).	Kimia Darah				
	1	Albumin	15,000	15,000	30,000
	2	Globulin	15,000	15,000	30,000
	3	Glokose sewaktu	15,000	15,000	30,000
	4	Glokose Puasa	15,000	15,000	30,000
	5	Triglyseride	15,000	15,000	30,000
	6	Cholesterol	15,000	15,000	30,000
	7	HDL - Cholesterol	15,000	15,000	30,000
	8	Protein Total	15,000	15,000	30,000
	9	Ureum	15,000	15,000	30,000
	10	Kreatinin	15,000	15,000	30,000
	11	Asam Urat	15,000	15,000	30,000
	12	Fe Serum	20,000	20,000	40,000
	13	SGPT	15,000	15,000	30,000
	14	SGOT	15,000	15,000	30,000
	15	Bilirubin Total	15,000	15,000	30,000
	16	Bilirubin Direct	15,000	15,000	30,000
d).	Immunologi				
	1	Widal OD/HD	25,000	25,000	50,000
	2	HBsAG	30,000	25,000	55,000
	3	Anti HBs	35,000	25,000	60,000
	4	Anti HCV	45,000	25,000	70,000
	5	HCG/ Planno Tes	15,000	15,000	30,000
	6	Reumatoid Faktor	30,000	25,000	55,000
	7	Malaria	100,000	50,000	150,000
	8	Tes Golongan Darah	10,000	15,000	25,000
	9	Tipoid	100,000	50,000	150,000
	10	DHF	100,000	50,000	150,000
	11	Tuberculosis	75,000	35,000	110,000
e).	Pemakaian Ambulance				
	1	Dalam Kota Maksimum 10 km	30,000	20,000	50,000
	2	Mengantar Jemput Pasien Luar Kota (> 10 km)	2.000 /km	3.000 /km	5.000 /km
	3	Mengantar Jenazah Dalam Kota (Maks 10 km)	30,000	40,000	70,000
	4	Mengantar Jenazah Dalam Kota (Lebih 10 km)	3.000 /km	3.000 /km	6.000 /km
		Catatan : BBM untuk luar kota belum termasuk			
	5	Petugas Pendamping Pengantar Jemput Pasien Luar Kota (> 5 km)	200,000	200,000	400,000
	6	Petugas Pendamping Pengantar Jemput Pasien Luar Kabupaten	200,000	200,000	400,000
E	Tarif Pelayanan/Tindakan Medik di Ruang Perawatan Puskesmas				
	1	Tindakan Medik / Asuhan Keperawatan per Hari Rawat Inap	50,000	100,000	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	TARIF JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			TIND. MEDIK (Rp)	TIND. ANESTESI (Rp)	
G.	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT				
	1 Pencabutan gigi permanen tiap elemen	15,000	40,000	5,000	60,000
	2 Pencabutan gigi dengan Komplikasi tiap elemen	15,000	60,000	5,000	80,000
	3 Tumpatan permanen tiap elemen gigi	20,000	70,000		90,000
	4 Tumpatan sementara per elemen	10,000	50,000		60,000
	5 Pencabutan gigi susu tiap elemen gigi	7,000	35,000	5,000	47,000
	6 Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	7,500	40,000	5,000	52,500
	7 Scalling tiap Kuadran				
	- Manual	10,000	50,000		60,000
	- Elektrik	15,000	50,000		65,000
	8 Pencabutan gigi terbenam				
	- Ringan	25,000	150,000	10,000	185,000
	- Berat	30,000	180,000	10,000	220,000
	9 Trepanasi	7,000	35,000	5,000	47,000
	10 Insisi abses	7,000	40,000	5,000	52,000
	11 Curet	10,000	150,000	5,000	165,000
H.	UNIT GAWAT DARURAT DAN BEDAH				
	1 Verban luka	5,000	10,000		15,000
	2 Jahit Luka per Jahitan	10,000	5,000	10,000	25,000
	3 Eksplorasi benda asing	10,000	25,000		35,000
	4 Pemasangan Kateter	10,000	25,000		35,000
	5 Pemasangan infus	5,000	30,000		35,000
	6 Luka Bakar	13,000	25,000		38,000
	7 Ekstraksi Kuku	10,000	30,000	10,000	50,000
	8 Cross Incisi	7,000	20,000	10,000	37,000
	9 Pencucian Lambung pada Keracunan	20,000	45,000		65,000
	10 Pemasangan Sonde	10,000	35,000		45,000
	11 Fiksasi eksternal perlokasi	12,000	8,000		20,000
	12 Pemakaian Oksigen tiap liter/menit	150	1,000		1,150
	13 Pemakaian alat pengisap (Suction)	7,500	7,500		15,000
	14 Sircumsisi (Khitanan)	50,000	75,000	10,000	135,000
	15 Exterpasi	15,000	25,000		40,000
	16 Rawat Luka (Mikrotomi	20,000	25,000	10,000	55,000
	17 Ganti Perban				
	- Luka kecil	10,000	5,000		15,000
	- Luka sedang	15,000	10,000		25,000
	- Luka besar	15,000	15,000		30,000
	18 Biopsi Jaringan Supervisial	15,000	20,000	10,000	45,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	TARIF JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			TIND. MEDIK (Rp)	TIND. ANESTESI (Rp)	
	19 Pasang gips	20,000	60,000		80,000
	20 Nebuleser	15,000	30,000		45,000
	21 AFF INFUS	5000	20000		25,000
	22 INJEKSI OBAT	5000	20000		25,000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Uraian	Tarif Dasar (Rp)		Keterangan
A.	Pelayanan Persampahan			
	1 Pemukiman			
	a. Rumah Tinggal Permanen			
	- Kelompok A	Rp 20,000	/bulan	Kelompok A: dengan jumlah penghuni lebih dari 10 (sepuluh) jiwa
	Kelompok B	Rp 17,000	/bulan	Kelompok B: dengan jumlah penghuni lebih dari 5 (lima) s/d 9 (sembilan) jiwa
	Kelompok C	Rp 15,000	/bulan	Kelompok C: Dengan jumlah penghuni sampai dengan 4 (empat) jiwa
	b. Rumah Tinggal Semi Permanen			
	Kelompok A	Rp 15,000	/bulan	Kelompok A: dengan jumlah penghuni lebih dari 10 (sepuluh) jiwa
	Kelompok B	Rp 13,000	/bulan	Kelompok B: dengan jumlah penghuni lebih dari 5 (lima) s/d 9 (sembilan) jiwa
	Kelompok C	Rp 10,000	/bulan	Kelompok C: Dengan jumlah penghuni sampai dengan 4 (empat) jiwa
	c. Rumah Tinggal Darurat	Rp 10,000	/bulan	
	d. Kos Kosan			
	- Kelas 1	Rp 15,000	/petak/bulan	Kelas 1: Rumah Petak/Paviliun
	- Kelas 2			
	- Tipe A	Rp 35,000	/bulan	Tipe A: Rumah Kos dengan jumlah kamar ≥ 10 (sepuluh) unit
	- Tipe B	Rp 25,000	/bulan	Tipe B: Rumah kos dengan jumlah kamar 5 (lima) s/d 9 (sembilan) Unit
	- Tipe C	Rp 15,000	/bulan	Tipe C: Rumah kos dengan jumlah kamar ≤ 4 (empat) unit

2	Kesehatan			
a.	Rumah Sakit Bukan Milik Daerah	Rp 15,000	/unit layanan/ bulan	Disesuaikan jumlah ruangan pelayanan
b.	Klinik/Apotik	Rp 30,000	/bulan	
c.	Toko Obat	Rp 20,000	/bulan	
3	Gedung Pemerintahan			
a.	Kantor Pemerintah Bukan Milik Daerah	Rp 35,000	/bulan	
b.	Kantor Swasta	Rp 35,000	/bulan	
c.	Bank	Rp 35,000	/bulan	
d.	Taman Kanak-kanak/Paud	Rp 15,000	/bulan	
e.	Sekolah Dasar Swasta	Rp 30,000	/bulan	
f.	SMP/SMA Swasta	Rp 40,000	/bulan	
g.	Akademik/PT/Kursus/Bimbel	Rp 35,000	/bulan	
4	Pasar			
a.	Pedagang Tetap, Kios Besar	Rp 30,000	/bulan	
b.	Pedagang Tetap, Kios Sedang, Kecil	Rp 20,000	/bulan	
c.	Pedagang Los Tanpa Kios/Pelataran	Rp 15,000	/bulan	
d.	Pedagang Kaki Lima	Rp 1,000	/hari	
e.	Warung Makan	Rp 15,000	/bulan	
f.	Los Ikan/Los Daging	Rp 1,000	/hari	
g.	Pedagang Tekstil/Pecah Belah/Mainan	Rp 15,000	/bulan	
5	Perniagaan			
a.	Toko			Penjualan secara Grosir/Bahan Bangunan dan Elektronik
	- Toko Besar	Rp 50,000	/bulan	di Pemukiman/tepi jalan Minimarket dan Toko Pakaian
	- Toko Kecil	Rp 35,000	/bulan	di Pemukiman/tepi jalan
	- Rumah Kios	Rp 20,000	/bulan	
	- Kios	Rp 15,000	/bulan	
b.	Hotel	Rp 50,000	/bulan	
c.	Penginapan/Losmen	Rp 40,000	/bulan	
d.	Rumah Makan	Rp 30,000	/bulan	
e.	Warung Makan	Rp 15,000	/bulan	
f.	Salon Kecantikan/Potong Rambut	Rp 15,000	/bulan	
g.	Tempat Hiburan/Kafe/Wisata	Rp 30,000	/bulan	
h.	Pencucian Mobil/Motor	Rp 20,000	/bulan	
i.	Penggudangan	Rp 60,000	/bulan	
j.	Gedung Serbaguna/BPU	Rp 50,000	/bulan	
6	Keramaian Umum			

	a. Pertunjukan/Pesta yang bersifat insidental	Rp 50,000	/kegiatan /hari	Kegiatan yang dilaksanakan secara insidental yang bersifat umum baik institusi maupun non institusi yang dipungut berdasarkan jumlah hari kegiatan
	b. Pelabuhan/Terminal bukan milik PEMDA	Rp 35,000	/bulan	
	7 Pembuangan Sampah ke TPA	Rp 25,000	Sekali membuang per Meter kubik	Orang atau perseorangan diluar Dinas Lingkungan Hidup yang membuang sampah ke TPA berdasarkan Volume (m3)
B	Pengolahan Limbah Kakus			
	1 Penyedotan kakus dari jasa ke IPLT			
	a. Per sekali sedot 1,5 m3	Rp 75,000		
	b. Per sekali sedot 1 m3	Rp 50,000		
	2 Pengolahan limbah tinja di IPLT			
	a. Per sekali buang 1,5 m3	Rp 25,000		
	b. Per sekali buang 1 m3	Rp 20,000		
C	Pengolahan Limbah Cair			
	1. Rumah Tangga			
	a. Kelompok A	Rp 17,000	/bulan	Kelompok A: Dengan jumlah penghuni lebih dari 10 (sepuluh) orang
	b. Kelompok B	Rp 10,000	/bulan	Kelompok B: Dengan jumlah penghuni lebih dari 5 (lima) s/d 9 (sembilan) orang
	c. Kelompok C	Rp 5,000	/bulan	Kelompok C: dengan jumlah penghuni sampai dengan 4 (empat) orang
	2. Sosial			Kantor Pemerintah/ swasta, lembaga pendidikan, Gedung Pertemuan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Tempat Tinggal/ Asrama
	a. Kelompok A	Rp 37,500	/bulan	Kelompok A: Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang, Sekolah dengan jumlah guru dan murid lebih dari 240 orang

	b. Kelompok B	Rp 22,500	/bulan	Kelompok B: Kantor dengan jumlah pegawai 25 s/d 50 orang, sekolah dengan jumlah guru dan murid lebih dari 180 s/d 240 orang
	c. Kelompok C	Rp 9,000	/bulan	Kelompok C: Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang, sekolah dengan jumlah guru dan murid kurang dari 180 orang
	3. Komersial			Rumah Makan, Hotel, Restaurant, Toko, Café, Bengkel, Pasar, Laundry, Tempat Pencucian Kendaraan, Pelabuhan dan Terminal Angkutan
	a. Kelompok A	Rp 45,000	/bulan	Pengguna sampai dengan 51 orang s/d 100 orang dan atau modal kurang dari Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah).
	b. Kelompok B	Rp 22,000	/bulan	Pengguna sampai dengan 11 s/d 50 orang dan atau modal kurang dari Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
	c. Kelompok C	Rp 12,000	/bulan	Pengguna sampai dengan 10 orang dan atau modal kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF ATAS
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Fasilitas Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Parkir di Tepi Jalan Umum Tidak Menetap	- Motor	2,000	Sekali Parkir
		- Becak Motor	2,000	Sekali Parkir
		- Sedan, Jeep, Pick Up, Mini Bus dan sejenisnya	5,000	Sekali Parkir
		- Bus, Truck dan alat besar lainnya	7,000	Sekali Parkir
2	Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Menetap	- Sedan, Jeep, Pick Up, Mini Bus dan sejenisnya	30,000	Per Bulan
		- Bus, Truck dan alat besar lainnya	40,000	Per Bulan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF ATAS PELAYANAN PASAR

No	Lokasi Pasar	Jenis Penerimaan	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pasar Salakan	- Pasar Petak Gol I	135,000	Per Bulan
		- Pasar Petak Gol II	84,000	Per Bulan
		- Pasar Petak Gol III	80,000	Per Bulan
		- Pasar Los Gol I	70,000	Per Bulan
		- Pasar Los Gol II	60,000	Per Bulan
		- Pasar Los Gol III	50,000	Per Bulan
		- Pasar Emperan/Pelataran Gol I	2,000	Per Hari
2	Pasar Kecamatan	- Pasar Petak Gol I	37,000	Per Bulan
		- Pasar Petak Gol II	32,000	Per Bulan
		- Pasar Los gol I	22,000	Per Bulan
		- Pasar Los Gol II	15,000	Per Bulan
		- Pasar Emperan/pelataran gol I	1,000	Per Hari

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAEF

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
JASA PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI,
DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN PELELANGAN

No	Jenis Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Tempat Pelelangan Ikan		
	a. Meja Tempat Jual Ikan	3,000	Per hari
	b. Los TPI	150,000	Per bulan
	c. Kios Mini	100,000	Per bulan
2	Fasilitas Lainnya		
	a. Box Freezer		
	1) 100 Liter	10,000	Per hari
	2) 200 Liter	20,000	Per bulan
	3) 500-600 Liter	50,000	Per bulan
	b. Cool Box		
	1) 100 Liter	3,000	Per hari
	2) 200 Liter	6,000	Per Hari
	3) 300 Liter	9,000	Per hari
	4) 500-600 Liter	12,000	Per hari
3	Tempat Pelelangan Ternak dan Hasil Bumi, Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya.	2000	Per Hari/m2

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Fasilitas Parkir	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1	Parkir Khusus di pelataran Parkir, Shelter, Gedung Parkir, Kawasan Wisata, Kawasan Pendidikan, Rumah Sakit, Puskesmas dan sejenisnya	-Motor	2,000	Per Kendaraan
		-Becak Motor	2,000	Per Kendaraan
		-Mobil (Roda 4)	5,000	Per Kendaraan
		-Mobil (Roda 6)	8,000	Per Kendaraan
		-Bus Besar	10,000	Per Kendaraan
2	Parkir Khusus Bermalam	-Motor	10,000	Per Kendaraan
		-Becak Motor	10,000	Per Kendaraan
		-Mobil (Roda 4)	20,000	Per Kendaraan
		-Mobil (Roda 6)	25,000	Per Kendaraan
		-Bus Besar	30,000	Per Kendaraan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Jenis/Tipe Kamar		Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
	a.	Standar	AC, TV, Kamar mandi	200,000	Per Hari
	b.	Supperior	AC, TV, Kamar mandi	250,000	Per Hari

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis Hewan	Tarif (Rp)		Keterangan
		Jasa Kolektor	Jasa Sarana	
1	Sapi	12,000	18,000	Per Ekor
2	Babi	8,000	12,000	Per Ekor
3	Kambing	8,000	12,000	Per Ekor
4	Unggas	600	900	Per Ekor

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN KEPELABUHANAN

No	Jenis Penerimaan	Satuan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Pelayanan Jasa Kapal		
	- Tambat di Dermaga Beton	Per GT/Jam	150
	- Tambat di Dermaga Kayu	Per GT/Jam	100
	- Tambat dipinggiran Pantai	Per GT/Jam	80
	- Kapal Istrahat (bermalam) di Dermaga	Per GT/Jam	150
	- Jasa Rambu Navigasi	Per GT/Jam	100
2	Pelayanan Jasa Penumpang		
	- Penumpang	Orang/Sekali Masuk	2,000
	- Karyawan/ABK Kapal	Orang/Bulan	5,000
3	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
	a. Pelayanan Tanda Masuk Pelabuhan		
	- Pengantar dan Penjemput	Orang/Sekali Masuk	2,000
	- Kendaraan Roda II	Unit/Sekali Masuk	2,000
	- Kendaraan Roda III	Unit/Sekali Masuk	2,000
	- Kendaraan Roda IV	Unit/Sekali Masuk	5,000
	- Kendaraan Roda VI	Unit/Sekali Masuk	8,000
	- Kendaraan Roda X	Unit/Sekali Masuk	10,000
	b Pelayanan Jasa Air Tawar		
	- Jasa Air Tawar untuk Karyawan Kapal	Per/Bulan	25,000
	c. Pelayanan Jasa Barang		
	- Penggunaan Tanah/Lahan untuk Penumpukan barang	Per Ton/Hari	1,000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
JASA PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO		JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KET
1	Tempat Rekreasi			
	1	Masuk Kawasan DTW	Anak - anak	Rp 2,000 Per orang
			Dewasa	Rp 3,000 Per orang
	2	Peggunaan Fasilitas		
		a. Cottage/	- Kamar Penginapan	Rp 50,000 Per kamar/malam
		Pondok Wisata	- Ruang Pertemuan/	Rp 500,000 Per Hari
			Rapat	
		b. Perahu Wisata	- Perahu Kayu	Rp 10,000 Per 1 kali Pakai
			- Perahu Karet/kano/	Rp 10,000 Per 1 kali Pakai
			kayak	
			- Perahu Fiber	Rp 10,000 Per 1 kali Pakai
			- Perahu bebek/	Rp 5,000 Per 1 kali Pakai
			Sepeda air (1 Org)	
			- Perahu bebek /	Rp 10,000 Per 1 kali Pakai
			Sepeda air	
		d. Olah Raga Air	- Banana Boat	Rp 15,000 Per 1 Kali jalan
			- Donat Boat	Rp 10,000 Per 1 Kali jalan
			- Alat Snorkling	Rp 10,000 Per 1 Kali jalan
			- Alat Diving	Rp 50,000 Per Tabung
		e. Tenda Kemah	2,5 m x 3 m (8 Org)	Rp 20,000 Per Hari
			1,5 m x 2 m (4 Org)	Rp 10,000 Per Hari
		f. Gazebo		Rp 5,000 Per 1 Kali Pakai
		g. Mobil Jeep		Rp 50,000 Per 1 kali pakai
		h. Motor Trail		Rp 20,000 Per 1 kali pakai

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN PENYEBERANGAN OORANG ATAU BARANG
DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	Jenis Penerimaan	Satuan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Retribusi Jasa Penyeberangan		
	- Penumpang	Orang/Sekali Menyeberang	2,000
	- Kendaraan Golongan I	Unit/Sekali Menyeberang	2,000
	- Kendaraan Golongan II	Unit/Sekali Menyeberang	3,000
	- Kendaraan Golongan III	Unit/Sekali Menyeberang	3,000
	- Kendaraan Golongan IV	Unit/Sekali Menyeberang	10,000
	- Kendaraan Golongan V	Unit/Sekali Menyeberang	50,000
	Kendaraan Golongan VI	Unit/Sekali Menyeberang	80,000
	Kendaraan Golongan VII	Unit/Sekali Menyeberang	100,000
	Kendaraan Golongan VIII	Unit/Sekali Menyeberang	135,000
	Kendaraan Golongan IX	Unit/Sekali Menyeberang	150,000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
JASA PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1	Usaha Pembibitan Sapi :		
	- Bibit Sapi Betina	Rp 7,000,000	Per Ekor
	- Bibit Sapi Pejantan	Rp 8,500,000	Per Ekor
2	Sapi Potong	Rp 12,000,000	Per Ekor
3	Usaha Pabrik Es Balok (Cold storage) :		
	- Es Balok	Rp 20,000	Per Balok
	- Cold Storge	Rp 1,000	Per Kilo
	- Ice plake / Es Curah	Rp 800	Per Kilo
	- Cool Room	Rp 1,000	Per Kilo
4.	Usaha Bibit		
	- Bibit Tanaman dengan Tinggi Tanaman 10 - 50 cm	Rp 10,000	Per Bibit
	- Bibit Tanaman dengan Tinggi Tanaman 50 - 100 cm	Rp 15,000	Per Bibit

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 JASA PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Jenis Retribusi		Besarnya Tarif (Rp)	KET
1	Penyewaan Tanah			
	a.	Pemakaian Tanah di Kec. Totikum, Kec. Totikum Selatan, Kec. Tinangkung Selatan dan Kec. Tinangkung Utara	175	Perbulan/m2
	b.	Pemakaian Tanah di Kec. Liang, Kec. Peling Tengah, Kec. Bulagi, Kec. Bulagi Utara, Kec. Bulagi Selatan, Kec. Buko dan Kec. Buko Selatan	150	Perbulan/m2
	c.	Pemakaian Tanah di Kec. Tinangkung	425	Perbulan/m2
2	Penyewaan Tanah dan Bangunan			
	a.	Penyewaan Tanah yang di Wilayah :		
	1	Kec. Totikum, Kec. Totikum Selatan, Kec. Tinangkung Selatan dan Kec. Tinangkung Utara	175	Perbulan/m2
	2	Kec. Liang, Kec. Peling Tengah, Kec. Bulagi, Kec. Bulagi Utara, Kec. Bulagi Selatan, Kec. Buko dan Kec. Buko Selatan	150	Perbulan/m2
	3	Kec. Tinangkung	425	Perbulan/m2
	b.	Penyewaan Bangunan di Wilayah :		
	1	Kec. Totikum, Kec. Totikum Selatan, Kec. Tinangkung Selatan dan Kec. Tinangkung Utara, Kec. Liang, Kec. Peling Tengah, Kec. Bulagi, Kec. Bulagi Utara, Kec. Bulagi Selatan, Kec. Buko dan Kec. Buko Selatan	2,000	Perbulan/m2
	2	Kec. Tinangkung	3,000	Perbulan/m2
3	Penyewaan Ruangan			
	1	Penyewaan Ruangan Balai Pertemuan		
	a.	Umum	600	Perhari/m2
	b.	Sosial dan Kegiatan Pemerintah	350	Perhari/m2
	2	Pendopo Pemda		
	a.	Umum	825	Perhari/m2

	b. Sosial dan Kegiatan Pemerintah	300	Perhari/m2
	3. Penyewaan Ruangan Lainnya	350	Perhari/M2
	4. Pemakaian Ruangan Untuk Kegiatan Tertentu	300,000	Perhari
4	Penyewaan Kendaraan Bermotor		
	1 Macro Bus (Peminjaman kategori Umum)	700,000	Persekali Sewa/hari
	2 Macro Bus (Peminjaman kategori Sosial/Keagamaan/Pendidikan/Kegiatan Pemerintah Daerah Diluar Tusi)	500,000	Persekali Sewa/hari
	3 Mini Bus/Micro Bus (Peminjaman kategori Umum)	600,000	Persekali Sewa/hari
	4 Mini Bus/Micro Bus (Peminjaman kategori Sosial/Keagamaan/Pendidikan/Kegiatan Pemerintah Daerah Diluar Tusi)	400,000	Persekali Sewa/hari
	5 Truck/Truct Attach (Peminjaman Kategori Umum)	600,000	Persekali Sewa/hari
	6 Truck/Truct Attach (Peminjaman Kategori Sosial/Keagamaan)	400,000	Persekali Sewa/hari
	7 Speed Boat 8 GT (Peminjaman Kategori Umum)	3,000,000	Persekali Sewa/Trip
	8 Speed Boat 8 GT (Peminjaman kategori Sosial/Keagamaan/Pendidikan/Kegiatan Pemerintah Daerah Diluar Tusi)	2,500,000	Persekali Sewa/Trip
	9 Speed Boat 500 PK (Peminjaman Kategori Umum)	300,000	Persekali Sewa/Trip
	10 Speed Boat 500 PK (Peminjaman kategori Sosial/Keagamaan/Pendidikan/Kegiatan Pemerintah Daerah Diluar Tusi)	250,000	Persekali Sewa/Trip
	11 Traktor Roda 4	35,000	Persekali Sewa /Hari
	12 Traktor Roda 2	7,000	Persekali Sewa /Hari
	13 Calivator	3,000	Persekali Sewa /Hari
5	Penyewaan Rumah Tempat Tinggal / Rumah Dinas		
	1 36 - 40	Rp 57,500	perbulan
	2 41 - 45	Rp 65,000	perbulan
	3 46 - 50	Rp 69,000	Perbulan
	4 51 - 55	Rp 120,000	Perbulan
	5 56 - 60	Rp 129,500	Perbulan
	6 61 - 65	Rp 140,000	Perbulan
	7 66 - 71	Rp 153,000	Perbulan
	8 72 - 75	Rp 162,000	Perbulan
	9 76 - 80	Rp 173,000	Perbulan
	10 81 - 85	Rp 184,000	Perbulan
	11 86 - 90	Rp 195,000	Perbulan

	12	91 - 95	Rp	205,000	Perbulan
	13	96 - 100	Rp	216,000	Perbulan
	14	105 - 110	Rp	237,000	Perbulan
	15	111 - 115	Rp	248,000	Perbulan
	16	116 - 120	Rp	259,000	Perbulan
	17	121 - 125	Rp	270,000	Perbulan
	18	125 - 130	Rp	280,000	Perbulan
	19	131 - 135	Rp	291,000	Perbulan
	20	136 - 140	Rp	302,000	Perbulan
	21	141 - 145	Rp	313,000	Perbulan
	22	146 - 150	Rp	324,000	Perbulan
	23	151 - 155	Rp	334,000	Perbulan
	24	156 - 160	Rp	345,000	Perbulan
	25	161 - 165	Rp	357,000	Perbulan
	26	166 - 170	Rp	367,000	Perbulan
	27	171 - 175	Rp	377,000	Perbulan
	28	176 - 180	Rp	388,000	Perbulan
6	Penyewaan Kendaraan Jenis Alat Berat				
	1	Asphalt mixing plant		3,210,995.55	Perjam
	2	Asphalt Finisher		161,932	Perjam
	3	Asphalt Sprayer		71,635.84	Perjam
	4	Buldozer 100-150 Hp		588,801.00	Perjam
	5	Compressor 4000-6500 L/M		163,119.90	Perjam
	6	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3		15,000	Perjam
	7	Concrete Vibrator		10,000	Perjam
	8	Digital Roller		14,300	Perjam
	9	Dump Truck 3 - 4 M3 (6 Ton)		215,628.66	Perjam
	10	Dump Truck (8 Ton)		258,995.94	Perjam

11	Dump Truck (4-6 M3)	81,074	Perjam
12	Excator 80 - 14-HP)	425,620	Perjam
13	Flat Bed Truk	244,039.38	Perjam
14	Generator Set	312,050.36	Perjam
15	Jack hammer	51,039.92	Perjam
16	Loader	216,000	Perjam
17	Motor Greder > 100 HP	576,785	Perjam
18	Oven Cup	49,900	Perjam
19	Pedestrian Roller	55,114.28	Perjam
20	Rock Drill Breker	64,724.74	Perjam
21	Stamper	12,900	Perjam
22	Track Loader 75-100 Hp	360,624.87	Perjam
23	Three Wheel Roller 6-8 Ton	188,601.63	Perjam
24	Stone Crusher	619,605.68	Perjam
25	Tandem Roller (2.5) Ton	165,500	Perjam
26	Tandem Roller (6-8) Ton	198,786.12	Perjam
27	Tire Roller (8 - 10) Ton	247,942.93	Perjam
28	Tamper	29,502.49	Perjam
29	Tronton (20) Ton	36,000	Perjam
30	Vibratory Roller (11) Ton	326,786	Perjam
31	Vibratory Roller (5 - 8) Ton	355,592.52	Perjam
32	Wheel Loader (Hitachi/4 Cycle Water - cooled	215,813	Perjam
33	Wheel Roller (6 - 8) Ton	396,623.13	Perjam
34	Water Pump (70-100) mm	29,721.14	Perjam
35	Water Tanker	76,300	Perjam
36	Water Tangker 3000-4500	205,167.13	Perjam

7. SEWA TEMPAT PEMASANGAN BILLBOARD DAN BALIHO

NO	LOKASI PENETAPAN	JENIS	UKURAN	BEARNYA TARIF PENYEWAAN (Rp)	KETERANGAN
1	IBUKOTA KECAMATAN TINANGKUNG	BILLBOARD	12 X 6	40,000	Per Hari
		BALIHO	4 X 6	30,000	Per Hari
		VIDEO TRONE/ MEGATRONE		350,000	Per Hari
2	IBUKOTA KECAMATAN LIANG	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
3	IBU KOTA KECAMATAN PELING TENGAH	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
4	IBU KOTA KECAMATAN BULAGI	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
5	IBU KOTA KECAMATAN BULAGI UTARA	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
6	IBU KOTA KECAMATAN BULAGI SELATAN	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
7	IBU KOTA KECAMATAN BUKO	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
8	IBU KOTA KECAMATAN BUKO SELATAN	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
9	IBU KOTA KECAMATAN TOTIKUM	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
10	IBU KOTA KECAMATAN TOTIKUM SELATAN	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
11	IBU KOTA KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari
12	IBU KOTA KECAMATAN TINANGKUNG UTARA	BALIHO	4 X 6	25,000	Per Hari

No	Uraian	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
8	Pelayanan Pemeriksaan Pada Laboratorium PUPR		
1.	Paket Peralatan Untuk Pengujian untuk Bahan dan Perkerasan jalan		
a.	Pengujian bahan di Laboratorium		
1)	Aspal Keras		
	a) Destilatas	Rp 97,500	Persampel
	b) Penetrasi dengan jarum	Rp 715,000	Persampel
	c) Penetrasi dengan konus	Rp 71,500	Persampel
	d) Ketahanan terhadap leleh	Rp 65,000	Persampel
	e) Titik lembek	Rp 45,500	Persampel
	f) Titik nyala	Rp 78,000	Persampel
	g) Daktilitas	Rp 50,050	Persampel
	h) Loss On Heating (LOH)	Rp 50,050	Persampel
	i) Penetrasi LOH	Rp 71,500	Persampel
	j) Titik Lembek LOH	Rp 40,950	Persampel
	k) Daktilitas LOH	Rp 84,500	Persampel
	l) Kelarutan dalam trichloroethylene (C ₂ H ₂ Cl ₃)	Rp 455,000	Persampel
	m) Berat jenis	Rp 40,300	Persampel
	n) Kekentalan	Rp 65,000	Persampel
	o) Kadar Parafin	Rp 650,000	Persampel
	p) Parameter malthene (PA)	Rp 1,170,000	Persampel
	q) Kelekatan Agregat	Rp 48,750	Persampel
	r) Kadar air	Rp 113,750	Persampel
	s) Viskositas absolute	Rp 78,000	Persampel
	t) Penurunan suhu	Rp 52,000	Persampel
	u) Dinamic shear rheometer (DSR)	Rp 975,000	Persampel
	v) Pressure Ageing Vessel (PAV)	Rp 130,000	Persampel
	w) Perkiraan suhu pencampur dan pemadatan	Rp 227,500	Persampel
2)	Aspal Cair		
	a) Kekentalan	Rp 65,000	Persampel
	b) Kadar air	Rp 113,750	Persampel
	c) Titik Nyala	Rp 45,500	Persampel
	d) Berat jenis	Rp 40,300	Persampel
	e) Penyulingan	Rp 65,000	Persampel
	f) Penetrasi residu	Rp 71,500	Persampel
	g) Daktilitas residu	Rp 78,000	Persampel
	h) Kelarutan dalam (C ₂ H ₂ Cl ₃)	Rp 455,000	Persampel
	i) Kelekatan	Rp 48,750	Persampel
	j) Perencanaan komposisi	Rp 260,000	Persampel
	k) Pengambilan sampel Core drill	Rp 585,000	Persampel
3)	Aspal Emulsi		
	a) kekentalan	Rp 65,000	Persampel
	b) Pengendapan	Rp 45,500	Persampel
	c) Semen Mixing	Rp 45,500	Persampel
	d) Muatan listrik	Rp 45,500	Persampel
	e) Analisa saringan	Rp 52,000	Persampel
	f) Penyulingan	Rp 65,000	Persampel
	g) Kadar minyak	Rp 39,000	Persampel
	h) Penetrasi residu	Rp 71,500	Persampel
	i) Daktilitas residu	Rp 78,000	Persampel
	j) Kelarutan dalam (C ₂ H ₂ Cl ₃)	Rp 455,000	Persampel
	k) Klasifikasi	Rp 65,000	Persampel
4)	Campuran beraspal		
	a) Ekstraksi (pro analisis)	Rp 1,625,000	Persampel

		b) Ekstraksi teknis	Rp	227,500	Persampel
		c) Penetresi	Rp	71,500	Persampel
		d) Titik Lembek	Rp	45,500	Persampel
		e) Daktilitas	Rp	78,000	Persampel
		f) Kadar aspal	Rp	6,500	Persampel
		g) Analisa saringan	Rp	50,050	Persampel
		h) Kadar air campuran	Rp	113,750	Persampel
		i) Resilent modulus	Rp	13,000	Persampel
		5) Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen			
		a) Analisa saringan	Rp	58,500	Persampel
		b) Berat jenis dan penyerapan	Rp	58,500	Persampel
		c) Berat isi	Rp	58,500	Persampel
		d) Kelekatan terhadap aspal	Rp	58,500	Persampel
		e) Abrasi	Rp	58,500	Persampel
		f) Impact	Rp	58,500	Persampel
		g) Crusing	Rp	58,500	Persampel
		h) Kepipihan	Rp	58,500	Persampel
		i) Lolos saringan no 200	Rp	58,500	Persampel
		j) Angularity	Rp	138,320	Persampel
		k) Polishing Stone value	Rp	130,000	Persampel
		l) size indek & Shape	Rp	97,500	Persampel
		m) Gumpalan Lempung	Rp	97,500	Persampel
		n) Soundness Agregat kasar	Rp	585,000	Persampel
		6) Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen			
		a) Analisa saringan berat jenis agregat halus	Rp	58,500	Persampel
		b) Penyerapan	Rp	58,500	Persampel
		c) Berat isi	Rp	58,500	Persampel
		d) Sand aquivalent	Rp	130,000	Persampel
		e) Atterberg limit	Rp	45,500	Persampel
		f) Soundness Agregat halus	Rp	585,000	Persampel
		g) Partikel ringan	Rp	58,500	Persampel
		h) Alkali reaktif	Rp	260,000	Persampel
		i) Organik impuritis	Rp	97,500	Persampel
		j) Angularity	Rp	138,320	Persampel
		7) Rencana campuran beton aspal			
		a) Berat jenis campuran	Rp	58,500	Persampel
		b) Analisa saringan agregat kasar (1 unit)	Rp	58,500	Persampel
		c) Berat jenis agregat kasar	Rp	58,500	Persampel
		d) Analisis saringan agregat halus (2 unit)	Rp	117,000	Persampel
		e) Berat jenis agregat halus (2 unit)	Rp	11,700	Persampel
		f) Briket marshall (15 unit)	Rp	590,070	Persampel
		8) Beton aspal			
		a. Parameter aspal	Rp	58,500	Persampel
		b. U - MATTA	Rp	387,400	Persampel
		c. Wheel tracking machine	Rp	390,000	Persampel
		d. Kepadatan mutlak	Rp	97,500	Persampel
		e. Marshall immersion	Rp	39,000	Persampel
		f. Gyropact viskositas untuk pencampuran dan	Rp	97,500	Persampel
		g. Pemadatan	Rp	135,850	Persampel

			h. Indirect tensile strength	Rp	135,850	Persampel
			i. Dartec	Rp	390,000	Persampel
			9) Agregat untuk base dan sub base			
			a) Analisa saringan	Rp	58,500	Persampel
			b) Berat jenis dan penyerapan	Rp	58,500	Persampel
			c) Berat isi	Rp	58,500	Persampel
			d) Kelekatan terhadap aspal	Rp	58,500	Persampel
			e) abrasi	Rp	58,500	Persampel
			f) Impact	Rp	58,500	Persampel
			g) Crusing	Rp	58,500	Persampel
			h) Atterberg limit	Rp	45,500	Persampel
			i) Pemadatan modified	Rp	108,810	Persampel
			j) CBR Modified	Rp	142,350	Persampel
			10) Tanah untuk sub base			
			a) Berat jenis	Rp	45,500	Persampel
			b) Atterberg limit	Rp	45,500	Persampel
			c) Analisa saringan	Rp	58,500	Persampel
			d) Pemadatan standart	Rp	58,500	Persampel
			e) CBR standar	Rp	136,110	Persampel
			f) pH	Rp	22,100	Persampel
			g) Kalsium oksida	Rp	45,500	Persampel
			h) Magnesium oksida	Rp	45,500	Persampel
			i) Feri oksida	Rp	45,500	Persampel
			j) Aluminium oksida	Rp	45,500	Persampel
			k) Silikat	Rp	45,500	Persampel
			l) Lon klor	Rp	45,500	Persampel
			m) Lon sulfat	Rp	45,500	Persampel
			n) Organik total	Rp	45,500	Persampel
			o) Kadar humus	Rp	45,500	Persampel
			p) Tahanan jenis	Rp	45,500	Persampel
			q) UCS	Rp	45,500	Persampel
			b. Paket Peralatan Untuk Pengujian Perkerasan jalan di Lapangan			
			1) Lendutan dengan benkelman beam (BB)	Rp	11,900	Pertitik
			2) Lendutan dengan falling weight deflectometer	Rp	20,200	Pertitik
			3) kelicinan dengan British pendulum tester (BPT)	Rp	19,500	Pertitik
			4) Texture dengan sand patch	Rp	13,500	Pertitik
			5) Texture dengan mini texture meter.	Rp	24,100	Per KM - jalur
			6) Kelicinan dengan Mu - meter	Rp	51,100	Per KM - jalur
			7) kerataan dengan NASSRA	Rp	12,100	Per KM - jalur
			8) Kerataan dengan laser	Rp	25,500	Per KM - jalur
			9) Kerataan dengan dipstick	Rp	100,500	Per KM - jalur
			10) Survei kondisi visual	Rp	49,600	Per KM - jalur
			11) Survei kondisi dengan view recon pembuatan lubang uji calofornia Bearing Ratio (CBR) dengan	Rp	29,000	Per KM - jalur
			12) Dyamix Cone Penetrimeter	Rp	580,000	Pertitik
			13) California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa pengalihan)	Rp	40,000	Pertitik
			14) California Bearing Ratio (CBR) In - situ (tanpa penggalan)	Rp	60,000	Pertitik

		15) Penggalian sampel inti (core drill)	Rp	98,600	Pertitik
		16) Pengambilan sampel blok	Rp	284,500	Pertitik
		17) Kepadatan dengan send cone	Rp	45,000	Pertitik
		18) Kepadatan dengan Rubber balon	Rp	21,000	Pertitik
	II	Geoteknik Jalan			
	1.	Paket Peralatan untuk Pengujian tanah di Laboratorium			
	a.	Indeks Properties			
		1) Analisa saringan	Rp	58,500	Persampel
		2) Hidrometer	Rp	24,700	Persampel
		3) Atterberg limit	Rp	45,500	Persampel
		4) Shinkage limit	Rp	22,100	Persampel
		5) Berat isi	Rp	58,500	Persampel
		6) Berat jenis tanah	Rp	45,500	Persampel
		7) Kadar air	Rp	9,100	Persampel
		8) Kadar abu	Rp	15,600	Persampel
		9) Ph meter	Rp	22,100	Persampel
		10) Kadar serat gambut	Rp	19,500	Persampel
		11) Kadar organik	Rp	29,250	Persampel
		12) Relatif density	Rp	26,000	Persampel
	b.	Soil Copaction			
		1) Pemadatan standar	Rp	58,500	Persampel
		2) Pemadatan modified	Rp	108,810	Persampel
		3) CBR standar soaked	Rp	65,000	Persampel
		4) CBR standar unsoaked	Rp	52,000	Persampel
		5) CBR midified soaked	Rp	78,000	Persampel
		6) CBR modified unsoaked	Rp	65,000	Persampel
		7) Resistivily test	Rp	45,500	Persampel
		8) Sub grade modified resilent	Rp	97,500	Persampel
	c.	Mechanical Preperties (Sifat Teknis)			
		1) Kuat tekan bebas	Rp	32,500	Persampel
		2) Kuat geser langsung manual kuat geser langsung automatic triaxial anconsolidated	Rp	39,000	Persampel
		3) Kuat geser langsung automatic triaxial anconsolidated	Rp	52,000	Persampel
		4) Manual	Rp	58,500	Persampel
		5) Triaxial consolidated automatic	Rp	71,500	Persampel
		6) Manual	Rp	188,500	Persampel
		7) Triaxial consolidated undrainedautomatic	Rp	273,000	Persampel
		8) Konsuludasi manual	Rp	84,500	Persampel
		9) Konsuludasi automatic	Rp	97,500	Persampel
		10) Rowe cell Q 250 mm	Rp	195,000	Persampel
		11) Rowe cell Q 75 mm	Rp	130,000	Persampel
		12) Swealing preasure	Rp	130,000	Persampel
		13) Vane test	Rp	52,000	Persampel
		14) Permeability falling head	Rp	45,500	Persampel
		15) Permeability constant head	Rp	52,000	Persampel
	2.	Paket Peralatan untuk Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan			
		1) CBR Lapangan	Rp	59,000	Pertitik
		2) DPC	Rp	40,000	Pertitik
		3) Sand cone	Rp	45,000	Pertitik

	4)	Piezocon	Rp	1,900,000	Pertitik
	5)	Piezocon disipasi per 4 jam	Rp	600,000	Per bacaan
	6)	Fiston Sampling	Rp	70,000	Per bacaan
	7)	Peat sampling	Rp	80,000	Per bacaan
	8)	Peat augering	Rp	30,000	Per bacaan
	9)	Sondir ringan, kapasitas 2,5 ton	Rp	220,000	Pertitik
	10)	Sondir berat, kapasitas 10 ton	Rp	350,000	Pertitik
	11)	Pemboran mesin tanah < 10 ton	Rp	120,000	Permeter
	12)	Pemboran mesin tanah > 10 ton	Rp	140,000	Permeter
	12)	Pemboran mesin batuan < 10 ton	Rp	280,000	Permeter
	13)	Pemboran mesin batua > 10 ton	Rp	320,000	Permeter
	14)	Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Rp	38,200	Pertabung
	15)	Pengambilan contoh batuan	Rp	64,000	Pertabung
	16)	Standart penetration test (SPT)	Rp	38,500	Peruji
	17)	Pemboran tangan	Rp	75,000	Permeter
	18)	Sumur uji	Rp	50,000	Pertitik
	19)	Seismic	Rp	10,500	Permeter
	20)	Geolistrik	Rp	122,500	Pertitik
	21)	Vane shear test	Rp	120,000	Peruji
	22)	Loading test			
		a) 0 s/d 50 ton	Rp	10,500,000	Pertitik
		b) 51 s/d 100 ton	Rp	13,500,000	Pertitik
		c) 101 s/d 200 ton	Rp	18,000,000	Pertitik
	23)	Pemasangan instrumen Inklinometer	Rp	360,000	Permeter
	24)	Pemasangan pisometer peneometik	Rp	480,000	Pertitik
	25)	Pemasangan pisometer casagrande	Rp	540,000	Pertitik
	26)	Pemasangan instrumen settlement	Rp	300,000	Pertitik
	3.	Jembatan dan Bangunan Jalan			
	a.	Pengujian bahan di laboratorium			
		1) Air			
		a) pH	Rp	22,100	Persampel
		b) Rasa	Rp	11,700	Persampel
		c) Bau	Rp	11,700	Persampel
		d) Bahan teruspensi	Rp	44,850	Persampel
		e) Bahan padat	Rp	44,850	Persampel
		f) Kadar minyak	Rp	68,250	Persampel
		g) Bikarbonat	Rp	68,250	Persampel
		h) Ion sulfat	Rp	68,250	Persampel
		i) Ion khlor	Rp	87,750	Persampel
		j) Ion Magnesium	Rp	87,750	Persampel
		2) Semen Untuk Campuran Karbon			
		a) Kehalusan	Rp	117,000	Persampel
		b) Waktu Pengikatan	Rp	44,850	Persampel
		c) Kuat tekan	Rp	87,750	Persampel
		d) Silika oksida	Rp	117,000	Persampel
		e) Alumunium oksida	Rp	58,500	Persampel
		f) Feri oksida	Rp	87,750	Persampel
		g) Magnesium oksida	Rp	87,750	Persampel
		h) Ion sulfat	Rp	97,500	Persampel
		i) Hilang Pijar	Rp	58,500	Persampel
		j) Alkali sebagai Na ₂ O	Rp	195,000	Persampel
		k) Kapur bebas	Rp	97,500	Persampel

			3)	Perencanaan Campuran Beton, benda uji (20 menit)	Rp 769,600	Persampel
			4)	Pengujian mutu beton		
			a)	Kuat tekan kubus	Rp 19,500	Persampel
			b)	Kuat tekan silinder	Rp 29,250	Persampel
			c)	Impact echo	Rp 19,500	Persampel
			d)	Kuat lentur	Rp 19,500	Persampel
		b.		Pengujian Beton dan Jembatan di lapangan		
			1)	Pengujian mutu beton dan cat beton		
			a)	Hammer test	Rp 37,500	Pertitik
			b)	Pundit	Rp 90,000	Pertitik
			c)	Impact echo	Rp 112,500	Pertitik
			d)	Windsor probe	Rp 375,000	Pertitik
			2)	Korosi beton		
			a.	Karbonasi beton	Rp 195,000	Pertitik
			b.	Resistivity	Rp 135,000	Pertitik
			3)	Stress relief test		
				Core drill + demee	Rp 645,000	Pertitik
			4)	Pengujian Kekuatan Jembatan		
			a.	Lendutan	Rp 11,250,000	Perbentang
			b.	Regangan	Rp 600,000	Pertitik
			c.	Getaran	Rp 7,500,000	Perbentang
			5)	Pengujian cover meter		
			a.	Pengukuran selimut beton	Rp 90,000	Pertitik
			b.	Pengukuran Q tulangan	Rp 90,000	Pertitik
			c.	Pengukuran jarak tulangan beton	Rp 90,000	Pertitik
			6)	Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang	Rp 3,000,000	Pertiang
			7)	Pengambilan sampel core drill	Rp 450,000	Pertitik
	III			Rekayasa Geoteknik dan Irigasi		
		1.		Uji Lapangan		
		a.		Pemboran tangan	Rp 75,000	Permeter
		b.		Pengambilan sampel tanah	Rp 60,000	Pertabung
		c.		SPT (Stabpipe penetrasi)	Rp 60,000	Peruji
		d.		Pemboran mesin (tanah)	Rp 200,000	Permeter
		e.		Pemboran mesin (batu)	Rp 250,000	Permeter
		f.		Pengujian kehalusan air (open end test)	Rp 75,000	Peruji
		g.		Sumur uji	Rp 150,000	Peruji
		h.		Sondir ringan	Rp 350,000	Pertitik/ uji
		i.		Sondir berat	Rp 750,000	Pertitik/ uji
		j.		Pemetaan geologi	Rp 350,000	Perhektar
		k.		Plate bearing test	Rp 3,000,000	Peruji
		l.		Pile loading test	Rp 7,500,000	Peruji
		m.		Field shear test (rock)	Rp 5,000,000	Peruji
		n.		Field loading/ unloading test (rock)	Rp 5,000,000	Peruji
		o.		Pleasuremeter :		
			1)	Lateral loading test 25 Kg/Cm ²	Rp 950,000	Peruji
			2)	Lateral loading test 100 Kg/Cm ²	Rp 2,000,000	Peruji
			3)	Lateral loading test 200 Kg/Cm ²	Rp 3,000,000	Peruji
			4)	Camkometer self boring	Rp 4,000,000	Peruji

		p	Vane shear test	Rp	100,000	Peruji
		2.	Penyelidikan Pondasi dan Bahan Timbunan			
		a.	Tanggul	Rp	60,000	Perkilometer
		b.	Bendung	Rp	100,000,000	Perpaket
		c.	Bendungan			
			1) kecil	Rp	100,000,000	Perpaket
			2) Sedang	Rp	150,000,000	Perpaket
			3) Besar	Rp	250,000	Perpaket
		3.	Laboratorium Mekanika Tanah			
		a.	Kadar air tanah	Rp	7,800	Persampel
		b.	Berat jenis tanah	Rp	13,000	Persampel
		c.	Atterberg limit	Rp	45,500	Persampel
		d.	Analisa saringan	Rp	26,000	Persampel
		e.	Pemadatan/ Standart	Rp	65,000	Persampel
		f.	Pemadatan modified	Rp	97,500	Persampel
		g.	CBR laboratorium	Rp	84,500	Persampel
		h.	Hidrometer (grand size)	Rp	65,000	Persampel
		i.	Shrinkage limit	Rp	19,500	Persampel
		j.	Unconfined Comp test	Rp	39,000	Persampel
		k.	Konsolidasi	Rp	65,000	Persampel
		l.	Berat isi	Rp	7,800	Persampel
		m.	Kuat geser langsung	Rp	65,000	Persampel
		n.	Permeabilitas (constant head)	Rp	52,000	Persampel
		o.	Triaxial (U.U)	Rp	65,000	Persampel
		p.	Triaxial (C.U)	Rp	84,500	Persampel
		4.	Laboratorium Mekanika Batuan			
		a.	Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Rp	65,000	Persampel
		b.	Kuat lentur	Rp	65,000	Persampel
		c.	Kuat tekan	Rp	78,000	Persampel
		d.	Kuat geser tak langsung	Rp	97,500	Persampel
		e.	Kuat geser langsung	Rp	195,000	Persampel
		f.	Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic	Rp	65,000	Persampel
		g.	Kuat tekak trixial	Rp	195,000	Persampel
		h.	Slake durability	Rp	65,000	Persampel
		i.	Analisa petrologi	Rp	65,000	Persampel
		j.	Analisa petrografie	Rp	195,000	Persampel
		k.	Punch test	Rp	65,000	Persampel
		l.	Point load strenght	Rp	32,500	Persampel
		5.	Laboratorium Bahan Bangunan Keairan			
		a.	Semen			
			1) Konsistensi	Rp	65,000	Persampel
			2) Pengikat Awal	Rp	65,000	Persampel
			3) Kuat tekan mortal + B89 + B116	Rp	97,500	Persampel
			4) Berat jenis semen	Rp	65,000	Persampel
			5) Kehalusan semen	Rp	65,000	Persampel
			6) Ketetapan bentuk	Rp	65,000	Persampel
		b.	Agregat			
			1) Abrasi	Rp	130,000	Persampel

		2) Gradasi	Rp	65,000	Persampel
		3) Berat Jenis	Rp	65,000	Persampel
		4) Berat isi	Rp	65,000	Persampel
		5) Kadar lumpur	Rp	65,000	Persampel
		6) Soundness	Rp	195,000	Persampel
		7) Organic	Rp	65,000	Persampel
		8) Mixed design	Rp	650,000	Persampel
	c.	Benda uji			
		1) Kuat tekan	Rp	325,000	Persampel
		2) Kuat tarik	Rp	65,000	Persampel
		3) Lentur	Rp	65,000	Persampel
		4) Kuat tekan dengan hammer test	Rp	32,500	Persampel
	IV	Retribusi Layanan Penyewaan Alat			
	1.	Laboratorium tanah			
	a.	Peralatan Triaxial Statis	Rp	195,000	Perunit/Perhari
	b.	Permeability Appr	Rp	149,500	Perunit/Perhari
	c.	Consolidation Appr	Rp	162,500	Perunit/Perhari
	d.	Mesin pemadatan Prokor	Rp	156,000	Perunit/Perhari
	e.	Oven pengering	Rp	65,000	Perunit/Perhari
	f.	CBR laboratorium	Rp	117,000	Perunit/Perhari
	g.	Standart proctor	Rp	97,500	Perunit/Perhari
	h.	Sand cone	Rp	97,500	Perunit/Perhari
	i.	Timbangan Elektris			
		1) Kapasitas 20 Kg	Rp	58,500	Perunit/Perhari
		2) Kapasitas 2000 gr	Rp	65,000	Perunit/Perhari
		3) Kapasitas 30 Kg	Rp	58,500	Perunit/Perhari
		4) Kapasitas 6 Kg	Rp	58,500	Perunit/Perhari
		5) Kapasitas 3 Kg	Rp	65,000	Perunit/Perhari
		6) Kapasitas 300 Gram	Rp	71,500	Perunit/Perhari
	j.	Alat untuk mengeluarkan sampel (Extruder)	Rp	65,000	Perunit/Perhari
	k.	Hand boring	Rp	97,500	Perunit/Perhari
	l.	Suhu	Rp	9,100	Persampel
	m.	Panas hidrasi	Rp	52,000	Persampel
	n.	Alat Speedy	Rp	65,000	Perunit/Perhari
	2.	Beton Keras			
	a.	Core drill	Rp	227,500	Persampel
	b.	Creep	Rp	84,500	Persampel
	c.	Hammer test	Rp	32,500	Persampel
	d.	MOE	Rp	32,500	Persampel
	e.	Kuat lentur	Rp	10,400	Persampel
	f.	Kuat tarik	Rp	10,400	Persampel
	g.	Kuat tekan	Rp	6,500	Persampel
	h.	Ultra sonie	Rp	45,500	Persampel
	i.	Analisa beton keras	Rp	390,000	Persampel
	j.	Permeabilitas	Rp	110,500	Persampel
	k.	Mol Cetakan Beton			
		1) Mol Silinder	Rp	19,500	Perunit/Perhari
		2) Mol Kubus	Rp	19,500	Perunit/Perhari
	l	Slump Test	Rp	39,000	Perunit/Perhari

	3.	Analisa Fisis		
	a.	Analisa butir	Rp 27,300	Persampel
	b.	Atterberg limit	Rp 45,500	Persampel
	c.	Berat jenis	Rp 20,800	Persampel
	d.	Bobot isi	Rp 22,100	Persampel
	e.	Kadar air	Rp 13,000	Persampel
	f.	Kadar Zat organik	Rp 19,500	Persampel
	g.	Susut bakar	Rp 48,100	Persampel
	h.	Susut kering	Rp 28,600	Persampel
	i.	Minorlogi	Rp 130,000	Persampel
	j.	Pengukur Suhu		
		1) Thermometer Suhu 0° s/d 300°	Rp 13,000	Perunit/Perhari
		2) Thermometer Suhu -10° s/d 200°	Rp 19,500	Perunit/Perhari
	k.	Sigmat Set	Rp 13,000	Perunit/Perhari
	l.	Saringan	Rp 26,000	Perunit/Perhari
	V	Layanan Jasa Pengujian		
	1.	Laboratorium Struktur		
		Kalibrasi	Rp 481,000	Perunit
	2.	Laboratorium Mekanika Tanah		
	a.	Triaxial	Rp 149,500	Persampel
	b.	Konsolidasi	Rp 130,000	Persampel
	c.	permeabilitas		
		1) Falling Head	Rp 117,000	Persampel
		2) Constanta Head	Rp 117,000	Persampel
	d.	Pemadatan Proktor		
		1) Modified	Rp 117,000	Persampel
		2) Standart	Rp 110,500	Persampel
	e.	Sondir	Rp 227,500	Persampel
	f.	CBR Laboratorium	Rp 130,000	Persampel
	g.	Sand Cone (Kepadatan lapangan dengan Kerucut pasir)	Rp 130,000	Persampel
	h.	Analisa butiran		
		1) Ayakan	Rp 97,500	Persampel
		2) Hydrometer	Rp 110,500	Persampel
	i.	Klasifikasi tanah		
		1) Berat jenis tanah	Rp 78,000	Persampel
		2) Berat cair (LL)	Rp 78,000	Persampel
		3) Batas plastis (PL)	Rp 78,000	Persampel
		4) Kadar Air	Rp 39,000	Persampel
		5) Bor tangan	Rp 201,500	Pertitik

No	Jenis Retribusi		Besarnya Tarif (Rp)			Satuan
			Jasa Bahan	Jasa Alat	Jasa Pemeriksaa n	
9	Pelayanan Pengujian pada Laboratorium Lingkungan Hidup					
	1).	Kualitas Air Bersih dan Air Limbah				
	a.	Fisik				
		- Warna	-	-	5,000	SNI 6989.80-2011
		- Bau	-	-	5,000	SNI 01 3553 2006
		- Rasa	-	-	5,000	SNI 01 3553 2006
		- TDS	-	5,000	5,000	SNI 06-6989.27-2005
		- Temperatur/Suhu	-	5,000	5,000	SNI 06-6989.23-2005
		- Turbidity/	-	5,000	5,000	SNI 06-6989.25-2005
	b.	Kimia				
		- Ph	-	5,000	5,000	SNI 06-6989.11-2004
		- S alinitas	10,000	5,000	5,000	Salinometer
		- DHL	10,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.1-2004
		- 4). DO	5,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.14-2005
		- COD	10,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.73-2009
		- BOD	15,000	10,000	5,000	SNI 06-6989.14-2005
		- TSS	15,000	10,000	5,000	SNI 06-6989.3-2004
		- Minyak Lemak	15,000	10,000	5,000	SNI 06-6989.10-2011
		- Fospat	10,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.31-2005
		- Sulfat	10,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.20-2009
		- Clorine	10,000	5,000	5,000	Spektrofotometer (Reagen)
		- Nitrat	5,000	5,000	5,000	Reagen Kit
		- Nitrit	5,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.9-2004
		- Fe	5,000	5,000	5,000	Reagen Kit
		- Cr (VI)	5,000	5,000	5,000	SNI 6989.71-2009
		- Sulfida	5,000	5,000	5,000	SNI 6989.75-2009
		- Sulfit	5,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.32-2005
		- Amonia (NH3-N)	5,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.30-2005
		- Tembaga	10,000	15,000	10,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
		- Timbal	10,000	15,000	10,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
		- Sianida	10,000	15,000	10,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
		- Seng	10,000	15,000	10,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
		- Kadmium	10,000	15,000	10,000	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
		- Surfaktan	5,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.51-2005
		- Kesadahan	5,000	5,000	5,000	SNI 06-6989.12-2004
	c.	Biologi				
	1	Coliform				
		- Metode H2S	25,000	10,000	10,000	Media

		-	Metode MPN	100,000	35,000	50,000	SNI 19-2897-1992
	2	E-coli					
		-	Metode MPN	100,000	35,000	50,000	SNI 19-2897-1992
	2	Kualitas Air Laut					
	a.	Fisik					
		-	Warna	-	-	5,000	SNI 6989.80-2011
		-	Bau	-	5,000	25,000	SNI 01 3553 2006
		-	Rasa	-	5,000	25,000	SNI 01 3553 2006
		-	TDS	-	5,000	25,000	SNI 06-6989.27-2005
		-	Temperatur/Suhu	-	5,000	25,000	SNI 06-6989.23-2005
		-	Turbidity/Kekeruhan	-	5,000	25,000	SNI 06-6989.25-2005
	b.	Kimia					
		-	Ph	25,000	25,000	25,000	SNI 06-6989.11-2004
		-	Salinitas	25,000	25,000	25,000	PORTABLE
		-	DO	35,000	35,000	35,000	SNI 06-6989.14-2005
		-	COD	35,000	35,000	35,000	SNI 06-6989.73-2009
		-	BOD	50,000	50,000	50,000	SNI 6989.72-2009
		-	Amonia Total	35,000	35,000	35,000	SNI 19-6964.7-2003
		-	Fospat	35,000	35,000	35,000	SNI 6989.31-2009
		-	Nitrat	35,000	35,000	35,000	SNI 19-6964.7-2003
		-	Sianida	50,000	50,000	50,000	SSA
		-	Sulfida	35,000	35,000	35,000	SNI 6989.70-2009
		-	Fenol Total	35,000	35,000	35,000	SNI 06-6989.21-2004
		-	Surfakatan	35,000	35,000	35,000	SNI 06-6989.51-2005
		-	Minyak Lemak	35,000	35,000	35,000	SNI 6989.10-2011
		-	TSS	-	5,000	25,000	SNI 06-6989.3-2004
	c.	Logam Terlarut					
		-	Krom Heksavalen	50,000	50,000	50,000	SNI 6989.71.2009
		-	Arsen	50,000	50,000	50,000	SSA
		-	Kadmium	50,000	50,000	50,000	SSA
		-	Tembaga	50,000	50,000	50,000	SSA
		-	Timbal	50,000	50,000	50,000	SSA
		-	Seng	50,000	50,000	50,000	SSA
		-	Nikel	50,000	50,000	50,000	SSA
	d.	Biologi					
		-	Coliform	100,000	35,000	50,000	SNI 19-2897-1992 (MPN)
		-	E-Coli	100,000	35,000	50,000	SNI 19-2897-1992 (MPN)
	e.	Kualitas Tanah					
		-	PH	-	20,000	20,000	Ph meter
		-	DHL	-	20,000	20,000	Tahanan listrik
		-	Redoks	-	20,000	20,000	Tegangan listrik
		-	Erosi	-	20,000	20,000	Pengamatan langsung
		-	Ketebalan solum	-	20,000	20,000	Pengamatan langsung

			-	Bebatuan Permukaan	-	50,000	20,000	Pengamatan langsung
			-	Komposisi Praksi	-	50,000	20,000	Gravimetric
			-	Berat isi	-	50,000	20,000	Gravimetric
			-	Porasitas Total	-	50,000	20,000	Berat Jenis dan berat isi
			-	Derajat Pelulusan Air	-	50,000	20,000	Permeabilitas
			-	Jumlah Mikroba	50,000	100,000	20,000	Plating technique
		f.		Kualitas Udara				
			-	Suhu udara	-	15,000	Rp10,000	Portable
			-	Kelembaban	-	15,000	Rp10,000	Portable
			-	H2S	10,000	10,000	15,000	Portable
			-	TSP	10,000	15,000	50,000	Gravimetric
			-	PM 2,5	10,000	10,000	15,000	Gravimetric
			-	PM 10	10,000	10,000	15,000	Gravimetric
			-	HCHO (Formaldhydc)	10,000	10,000	15,000	Gravimetric
			-	Pb	10,000	10,000	15,000	Gravimetric
			-	Kebisingan	10,000	10,000	15,000	Gravimetric
			-	SO2	10,000	10,000	15,000	Portable
			-	CO	10,000	10,000	15,000	SNI 19-7119.7-2005
			-	NO2	10,000	10,000	15,000	NDIR Analyzer
			-	O3	10,000	10,000	15,000	SNI 19-7119.2-2005
			-	HC	10,000	10,000	15,000	Chemiluminescent
			-	Debu jatuh	10,000	10,000	15,000	Flamed Ionization
			-	NH3-N	10,000	10,000	15,000	SNI 19-7119.1-2005

No	Jenis Retribusi			Besarnya Tarif (Rp)		Satuan
				Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
7	Biaya Pengambilan Sampel					
	a.	Pengambilan Sampel Udara				
		I	Ruas: (Tinangkung (diluar Salakan), Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan, Peling tengah, Liang)	250,000	150,000	Orang /Sampel

			2	Ruas: (Totikum, Totikum Selatan, Bulagi, Bulagi selatan, Bulagi Utara, Buko, Buko Selatan), Kab. Banggai Laut	350,000	150,000	Orang / Sampel
		b.	Pengambilan Sampel Air				
			1	Ruas: (Tinangkung (diluar Salakan), Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan, Peling tengah, Liang)	250,000	100,000	Orang / Sampel
			2	Ruas: (Totikum, Totikum Selatan, Bulagi, Bulagi selatan, Bulagi Utara, Buko, Buko Selatan), Kab. Banggai Laut	350,000	100,000	Orang / Sampel
		c.	Pengambilan Sampel DAMIU				
			1	Ruas: (Tinangkung (diluar Salakan), Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan, Peling tengah, Liang)	250,000	50	Orang / Sampel
			2	Ruas: (Totikum, Totikum Selatan, Bulagi, Bulagi selatan, Bulagi Utara, Buko, Buko Selatan), Kab. Banggai Laut	350,000	50	Orang / Sampel

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu tentang atas layanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung melalui perkalian antara Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Igb) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Igb$$

2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung melalui perkalian antara indeks fungsi (If), penjumlahan dari perkalian bobot parameter (bp) dan indeks parameter (Ip), dan faktor kepemilikan (Fm) atau dinyatakan dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp 6.520.000/m²

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indes Fung si (If)	Klasifikasi	Bobot Para meter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tebal Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koofisien Jumlah Lantai
>100 m2 dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara Perorangan/ Badan Usaha	0
Ganda/Campur an Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				1
Luas > 500 m2 dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704

1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
29	1,666		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien kegiatan BG=

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

$$(\sum LLi + \sum LBi)$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
KL : Koefisien jumla lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penerapan Peghitungan Indeks Terintegrasi

1. Fungsi Hunian

Funngsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum(bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintregrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum(bp \times lp) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintregrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		$0,2 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum(bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintregrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

H. Contoh Penghitung Retriusi Perizian Tertentu yang terutang atas Pelayanan PBG

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 38 di Kabupaten X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Lama Bangunan (Lit)	:	36 m2
Ketinggian	:	1 Lantai
Lokasi	:	Kabupaten X
Kepemilikan	:	Priibadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum(bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks Terbangun
	:	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp. 167.500

2. Studi Kasus gedung restoran baru di Kabupatten X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Lama Bangunan (Lit)	:	738 m2
Ketinggian	:	3 Lantai
Lokasi	:	Kabupaten X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usahal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum(bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks Terbangun
	:	$738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp. 20.832.411,-

II. Prasarana Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tariff pelayanan persetuan bangunan gedung atas prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu terutang atas layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung melalui perkalian antara Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

$$V \times I \times Ibg \times HS \text{ pbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks Prasarana Bangunan Gedung

HSpbg= Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Harga Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	HSpbg (dalam Rp.)	Pemba ngunan Baru	Rusak Berat/Peker jaan Konstruksi sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pek erjaan Konstruksi sebesar 65% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul <i>Retaining Wall</i>	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penhubung	Jembatan	10.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	10.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		10.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		10.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		10.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam /reservoir bawah tanah	Kolam renang	1.000.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1.000.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		1.000.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	1.000.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	1.000.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		1.000.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	200.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	200.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		DI dalam persil	200.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	200.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	10.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	10.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	10.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	500.000/unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		 /unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		4.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki;	Ketinggian 25-50 m	2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	4.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	4.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	4.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	2) Sistem <i>guy wire</i> bentang kawat;	Ketinggian 0-50 m	 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1. Ketinggian <25	1.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2. Ketinggian 25-50 m	2.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3. Ketinggian >50 m	3.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara Mandiri				
		1. Ketinggian <25 m	1.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2. Ketinggian >25-50 m	2.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3. Ketinggian >50 m	3.000.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki Tanam bahan bakar		 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	1.000.000 /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2. Kolam tampung	 /m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Kontribusi penyimpanan/ silo		 /m3	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR